



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI
PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA KANTOR PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN
PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Oleh :

Dinda Febriana

NPM : 4317500108

Diajukan kepada :

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2021



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI
PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA KANTOR PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN
PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

Dinda Febriana

NPM : 4317500108

Diajukan kepada :

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2021



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI
PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA KANTOR PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN
PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Oleh :

Dinda Febriana

NPM : 4317500108

Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal : 10 Juli 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M.
NIDN. 0616058002

Aminul Fajri, S.E., M.Si, Ak
NIDN. 0602037002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN. 0628117502

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dinda Febriana
NPM : 4317500108
Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah
Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Pemerintah
Desa Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)p

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 10 Juli 2021

Ketua Penguji



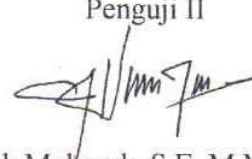
Dr. H. Tabrani, M.M
NIDN. 0612126001

Penguji I



Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M
NIDN. 0616058002

Penguji II



Abdulloh Mubarak, S.E., M.M., Akt., CA
NIDN. 0331077302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN. 0628117502

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah (sekecil apapun), niscaya dia akan melihat (balasan)nya”

(Q.S Al-Zalzalah : 7)

“Aku, Kamu, serta mereka memiliki proses yang berbeda dan waktu pencapaian impian yang berbeda pula. Maka jangan pernah sekalipun membandingkan prosesmu dengan proses orang lain”

(Dinda Febriana)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi spesial ini untuk:

1. Kedua orang tua tercintaku Bapak Budiyanto dan Ibu Wiwik Minarti yang tanpa henti mendoakan, memberi kasih sayang, serta menyemangati untuk selalu melakukan yang terbaik.
2. Mbak ku satu-satunya Luki Eka Mardiana yang selalu memberikan semangat serta motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu.
3. Keponakanku tersayang Mayang Nareswari dan Alkalova Pratista yang sudah menjadi penghibur ketika keputekan menerpa.
4. Mbak Sepupu Wigi Astuti yang tiada hentinya memberikan dukungan serta siap sedia membantu menemani dalam penyebaran kuesioner.
5. Seseorang istimewa Faisal Mufti Ali yang tiada hentinya memberikan semangat serta menguatkan diriku sehingga skripsi dapat terselesaikan.
6. Sobat setiakku Irfani Rosyidah dan Khumaeroh yang tanpa hentinya memberikan semangat serta do’a untukku.
7. Almamaterku Universitas Pancasakti Tegal.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Febriana

NPM : 4317500108

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”.

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal,.....

Yang Menyatakan,



Dinda Febriana

ABSTRAK

Dinda Febriana, 2021. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang).

Tujuan Penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 4) Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Metode penelitian ini memakai penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu data primer melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel 76 responden yang terdiri dari perangkat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara (Kaur Keuangan), dan BPD. Teknik pengambilan sampel yang dipakai yaitu sampel jenuh. Metode analisis data yang digunakan yaitu pengujian kulaitas data, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis.

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. Hal itu mengindikasikan semakin tinggi sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi, serta aksesibilitas laporan keuangan maka akan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

Dinda Febriana, 2021. *The Influence Of Internal Control System, Village Government Competence, Transparency, And Accessibility Of Financial Report Of Village Fund Management Accountability (Case Study At The Village Government Office In Petarukan District, Pemalang Regency).*

The purpose of this study is 1) To determine the effect of the internal control system on the accountability of village fund management. 2) To determine the effect of village government competence on village fund management accountability. 3) To determine the effect of transparency on the accountability of village fund management. 4) To determine the effect of the accessibility of financial reports on the accountability of village fund management.

This research method uses quantitative research. The data collection technique used is primary data through the distribution of questionnaires with a sample of 76 respondents consisting of village officials such as the village head, village secretary, treasurer, and BPD. The sampling technique used is the saturated sample. The data analysis method used is data quality testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing.

The results of data analysis in this study indicate that the internal control system, village government competence, transparency, and accessibility of financial reports have a positive effect on the accountability of village fund management in Petarukan district, Pemalang regency. This indicates that the higher the internal control system, village government competence, transparency, and accessibility of financial reports, the higher the level of accountability for village fund management.

Keywords: *Internal Control System, Village Government Competence, Transparency, Accessibility Of Financial Report, Village Fund Management Accountability*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian untuk skripsi dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”.

Tujuan proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyusun skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Penulis menyadari dalam penulisan proposal penelitian ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah bersedia membantu. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E.,M.M.,Ak,C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Abdulloh Mubarak, S.E.,M.M.,Ak.,CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
4. Aminul Fajri, S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi kepada peneliti.

5. Kedua orang tua tercinta Bapak Budiyanto dan Ibu Wiwik Minarti, serta kakak kandung satu-satunya yang tersayang yaitu Luki Eka Mardiana. Terima kasih senantiasa mendoakan di setiap penghujung sholatnya, memberikan motivasi, dukungan dan nasihat kepada penulis.
6. Sahabat seperjuanganku Aninda, Fifi, Fani, Dina, Indri, dan Ikha bersama yang tanpa hentinya memberikan semangat satu sama lain serta telah melukis kenangan indah yang tidak bisa dilupakan di masa perkuliahan selama empat tahun.

Dalam penulisan proposal penelitian guna skripsi ini, penulis menyadari masih ada banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang mempunyai sifat membangun bagi kesempurnaan proposal penelitian untuk skripsi ini. Semoga proposal penelitian untuk skripsi ini berguna dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Tegal, 2021

Dinda Febriana

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Stewardship	13
2. Pemerintah Desa.....	15
3. Dana Desa	20
4. Sistem Pengendalian Internal	22
5. Kompetensi Pemerintah Desa	27
6. Transparansi	31
7. Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	34

8. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	36
B. Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	49
D. Perumusan Hipotesis	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Populasi dan Sampel	57
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	59
1. Definisi Konseptual.....	59
2. Definisi Operasional Variabel.....	62
D. Metode Pengumpulan Data	64
E. Uji Kualitas Data.....	65
1. Uji Validitas	65
2. Uji Reliabilitas.....	65
F. Metode Analisis Data	66
1. Statistik Deskriptif.....	66
2. Uji Asumsi Klasik	66
a. Uji Normalitas Data	66
b. Uji Multikolinearitas	67
c. Uji Heteroskedastisitas	67
3. Analisis Regresi Linear Berganda	68
4. Pengujian Hipotesis	69
a. Uji Statistik t (uji parsial).....	69
b. Uji Statistik F (uji simultan).....	70
c. Koefisien Determinasi	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Gambaran Umum	72
B. Hasil Penelitian	76

C. Pembahasan.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
C. Keterbatasan Penelitian.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.1 Populasi Penelitian.....	58
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	62
Tabel 4.1 Fasilitas Sekolah di Kecamatan Petarukan	74
Tabel 4.2 Anggaran Dana Desa	74
Tabel 4.3 Jenis Kelamin.....	77
Tabel 4.4 Umur Responden.....	77
Tabel 4.5 Pendidikan Terakhir	78
Tabel 4.6 Masa Kerja	79
Tabel 4.7 Uji Validitas	80
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas	83
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif	84
Tabel 4.10 Uji Normalitas	86
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas	87
Tabel 4.12 Analisis Regresi Linear Berganda.....	90
Tabel 4.13 Uji Statistik T (Parsial)	92
Tabel 4.14 Uji Statistik F (Simultan)	94
Tabel 4.15 Uji Koefisien Determinasi	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini pemerintahan khususnya bangsa Indonesia mengalami perubahan signifikan yang ditandai dengan adanya reformasi dalam segi politik yang kemudian mulai memasuki ke dalam segi keuangan bangsa yaitu pada penyelenggaraan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Aspek yang menunjukkan hal itu bisa ditunjukkan dengan kemajuan pada ilmu akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah adalah ilmu *accounting* mencakup proses pencatatan serta pelaporan terkait transaksi didalam pemerintahan. Terdapatnya permintaan masyarakat atas transparansi serta akuntabilitas untuk seluruh pencatatan transaksi serta laporan keuangan dari pemerintah, jadi akuntansi berarti suatu keperluan utama dalam pemerintahan di saat proses penyusunan laporan keuangan terutama pemerintah yang tidak boleh diremehkan (Rosyidi, 2018).

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk kewenangan guna ditujukan oleh pemerintah pusat untuk daerah dengan tujuan guna mengatur dan mengurus sistem pengelolaan pemerintahannya sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya senantiasa mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. Otonomi daerah juga menjadi bentuk usaha pemerintah pusat dalam mencapai kemandirian daerah yang berpusat pada pemberdayaan lokal. Dengan adanya

otonomi daerah maka secara keseluruhan pemerintah pusat tidak lagi membantu pemerintah daerah karena diharapkan pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam menyusun dan mengerjakan seluruh kegiatannya, sehingga pemerintah daerah harus mampu menetapkan belanja daerahnya sendiri secara efisien dan efektif, meningkatkan pendapatan daerah melalui sumber daya alam yang tersedia seperti melestarikan tempat wisata, serta meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatannya kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi (Widjaja, 2011).

Pemerintahan desa yaitu tingkatan pemerintahan terendah serta bersosialisasi langsung dengan warga desa. Pemerintah desa juga bertugas meringankan pemerintah pusat guna menyelenggarakan bantuan terhadap khalayak umum, pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005. Pengertian desa yaitu persatuan masyarakat yang mempunyai batasan daerah serta wewenang dalam menangani serta mengatur keperluan masyarakatnya. Ditanggal 15 januari 2015 telah disahkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa sesudah melewati polemik pro dan kontra dalam pembahasan sekitar 7 tahun antar badan legislatif. Di dalam undang-undang itu desa akan menginjak di era modernisasi yang ditandai adanya pembangunan kawasan demi terwujudnya harapan baru didalam kehidupan bermasyarakat serta pemerintahan di desa. Desa juga menerima kesempatan besar guna mengurus tata pemerintahannya

sendiri dan juga dalam penyelenggaraan pembangunan yang bertujuan memperbaiki kualitas juga kenyamanan hidup warga desa.

Pencairan dana dari pemerintah pusat ke desa dalam jumlah besar pastinya akan menuntut pertanggungjawaban yang besar pula. Pada tahun 2015, sudah dilakukan pengalokasian dana desa oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 20,7 Triliun bagi 74.093 desa, ditahun 2016 sebanyak Rp. 40,98 Triliun (T) bagi 74.754 desa, serta ditahun 2017 kembali meningkat sebanyak Rp. 60 Triliun untuk berbagai desa yang berada di semua penjuru Indonesia. Selain dana desa, ada juga pendapatan desa lain seperti alokasi dana desa, dana bantuan berasal dari pemerintah baik provinsi, kota, sampai kabupaten, serta dana bagi hasil pajak maupun retribusi daerah (Fadil, 2020).

Pemakaian alokasi dana desa rawan terhadap praktik kecurangan yang dapat berupa penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang semestinya dapat dipercayai masyarakat didalam pembangunan desa agar makin maju secara signifikan. Oleh karena itu posisi masyarakat sangat utama guna mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya ke arah yang lebih baik serta semaksimal mungkin mencegah kecurangan. Hal tersebut dijalankan sebab sebesar 70% dari ADD ditujukan guna kepentingan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya di sektor pembangunan atau perbaikan sarana serta prasarana nyata desa (baik sarana umum dalam ukuran kecil serta renovasi lingkungan dan permukiman), sedangkan untuk 30% digunakan

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi guna menunjang pelaksanaan pemerintah desa serta operasional Badan Permusyawaratan Desa (Widiyanti, 2017).

Pemerintah desa diwajibkan dapat mengimplementasikan prinsip akuntabilitas guna mengelola finansial desa, sebagaimana segala aktivitas pelaksanaan pemerintahan desa layak dipertanggungjawabkan terhadap warga desa selaras dengan ketentuan yang berlaku maka akan tercapai tata kelola pemerintahan desa yang bagus. Jumlah dana desa yang sangat besar diprediksi akan terus bertambah jumlahnya di setiap tahun, maka dari itu dibutuhkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Akuntabilitas menjadi hal utama yang wajib dicapai dalam pengelolaan keuangan suatu entitas usaha ataupun pemerintahan selaku wujud pertanggungjawaban untuk *shareholder* dalam tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas juga berarti bentuk tanggung jawab bagi setiap individu, kelompok maupun instansi untuk memenuhi kewajibannya (Puspa & Prasetyo, 2020). Menurut Mahsun (2006) principal dalam hal ini yaitu pihak pemberi amanah yang berhak diberi pertanggungjawaban oleh agen yang berhak menerima amanah.

Akuntabilitas di bidang khusus senantiasa ada secara otomatis jika entitas sudah ataupun sedang melaksanakan publikasi dampak dipasar modal serta entitas yang memegang harta ketika ukuran dipakai untuk acuan bagi seluruh gabungan rakyat (Narsa, 2017). Dibandingkan dengan akuntabilitas bidang khusus, akuntabilitas dibidang umum adalah salah satu perihal yang

pasti terlihat. Bagi pemerintah akuntabilitas dianggap berpengaruh guna dipunyai karena dengan terdapatnya akuntabilitas itu bisa menambah tingkat kepercayaan warga kepada kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah.

Mewujudkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa bisa dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor yang pertama yaitu sistem pengendalian intern (SPI). Sistem pengendalian intern yaitu bagian metode dimana organisasi mampu merealisasikan kegiatan dengan efektif serta efisien, akuntabilitas finansial bisa dijadikan pedoman dan diharuskan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku (Aramide, *et al.*, 2015). Sistem pengendalian intern juga berarti suatu elemen dari beberapa metode dalam mencapai akuntabilitas dipemerintahan umum, apabila dievaluasi belum sanggup guna mewujudkan akuntabilitas secara umum dengan munculnya asumsi badan pengawas keuangan dalam laporan keuangan pemerintahan yang disajikan pihak pemerintah. Selain SPI yang dibutuhkan didalam pengelolaan dana desa, desa juga membutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dapat diandalkan serta mempunyai integritas yang tinggi mengingat pada zaman sekarang banyak tindak korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa dengan memanipulasi laporan keuangan.

Faktor kedua yaitu kompetensi yang dipunyai pengelola ADD yang menjadikan ketentuan primer supaya akuntabilitas pada desa dapat dilakukan dengan baik dan maksimum. Kompetensi mencakup mengenai wawasan, kemampuan serta keahlian yang dipunyai seseorang. Pemerintahan desa

diharuskan mempunyai perangkat pengelola finansial yang memiliki kemampuan dalam membuat laporan keuangan serta bisa dipercayai sehingga tingkat akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa bisa lebih baik lagi. Selain itu juga rendahnya tingkat transparansi laporan keuangan yang menimbulkan berbagai asumsi negatif masyarakat kepada aparat, maka dibutuhkan akuntabilitas sebagai acuan dalam mengontrol aparat desa (Cheng, 2002).

Faktor ketiga dalam akuntabilitas yang diperlukan yaitu unsur transparansi yang tidak boleh dilewatkan sebagai satu kesatuan yang harus ada di dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi merupakan indikator penting karena dapat menunjukkan profesionalisme penyelenggara, semakin tinggi keterbukaannya mengenai setiap kegiatan maka tingkat transparansi pun akan semakin baik (Dilago, *et al.*, 2018). Apabila prinsip transparansi diterapkan maka menyebabkan terjadinya hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang baik sehingga pemerintah pun tidak segan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dengan menjamin dan memberikan kemudahan terhadap aksesibilitas laporan keuangan secara akurat.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas adalah bagian dari dasar-dasar tata pemerintahan yang bagus, sebab upaya guna mencapai tata pemerintahan yang bagus yaitu aksesibilitas laporan keuangan yang bagus pula dan sesuai

norma yang berlaku. Berdasarkan James (2003) menerangkan teori aksesibilitas mengemukakan bahwa suatu tujuan yang dapat dicapai dengan mudah secara langsung. Aksesibilitas pada laporan keuangan memiliki arti dalam memberi akses kepada beberapa pihak yang memiliki kepentingan guna mendapatkan laporan keuangan dengan biaya murah dan mudah (Santi, *et al.*, 2018). Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah adalah bentuk upaya hak mempublikasikan yang wajib dilaksanakan pemerintah.

Indonesia corruption watch menyatakan kasus korupsi dibidang anggaran desa merupakan perkara terbanyak yang diadili aparaturnya penegak hukum dibandingkan dengan sektor lainnya, dimana kasus yang terjadi terus meningkat dari rentang tahun 2016 hingga 2020. Data ICW menunjukkan pada tahun 2016-2017 sebanyak 110 kasus korupsi dana desa, pada tahun 2018 terjadi 102 kasus (Satrio, 2019). Pada tahun 2019 ada 46 kasus korupsi anggaran desa yang diketahui menyebabkan negara mengalami kerugian Rp.32,3 miliar (Ramadhan, 2020). Ditahun 2020 terjadi 44 kasus korupsi anggaran dana desa (Bayu, 2020).

Kepala Desa masuk dalam kategori 5 besar pelaku praktik korupsi di Indonesia selaras dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Pematang Jaya tepatnya di Kecamatan Taman dimana mantan kepala desa Gondang didakwa atas penyalahgunaan sumber dana pembangunan pemerintah desa yang mencakup pendapatan asli desa (PAD), bantuan provinsi, dana desa (DD), serta pemasukan lainnya sebesar Rp 518,6 juta dan dikenai hukuman selama 3

tahun 10 bulan serta denda Rp 50 juta. Penyelewengan tersebut terjadi pada tahun 2013 ketika terdakwa masih menjabat sebagai kepala desa Gondang dan terdeteksi kecurangannya di akhir tahun 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Pematang (Baihaqi, 2019).

Rincian kasus tersebut bisa diidentifikasi fenomena permasalahan yang terjadi ialah rendahnya tingkat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengalokasian, pengawasan anggaran dana desa, kurang maksimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kurangnya transparansi informasi mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat umum sehingga banyak masyarakat awam menanyakan penggunaan dana desa dan menimbulkan berbagai asumsi masyarakat yang lebih mengarah ke hal negatif seperti tindak penggelapan dana, serta tingginya biaya politik pemilihan kepala desa. Disamping itu juga terdapat modus-modus yang dipakai guna melakukan tindak penggelapan dana desa antara lain : proyek fiktif, double budget, penggelembungan anggaran, penggelapan dan suap.

Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan ADD sudah dilaksanakan sebelumnya oleh para peneliti yang lain tentunya dengan variabel yang berbeda-beda, seperti (Puspa & Prasetyo, 2020) yang meneliti mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, aksesibilitas, dan kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil riset tersebut menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa dan SPI berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun aksesibilitas

laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Lain hal dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014) dengan menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lainpun dilakukan oleh (Mualifu, *et al.*, 2019) mengenai pengaruh kompetensi, transparansi, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (studi empiris pada semua desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). Dari penelitian tersebut membuktikan kompetensi, transparansi, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti akan melaksanakan penelitian mengenai **“Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Desa Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang)**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan peneliti, sehingga bisa dirumuskan permasalahan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?
2. Apakah kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?
3. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?
4. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang diuraikan pada rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

2. Untuk mengetahui kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
3. Untuk mengetahui transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
4. Untuk mengetahui aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberi manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara manfaat teoritis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bentuk praktik dalam menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan ketika sudah diperoleh di masa perkuliahan serta bermanfaat bagi orang lain untuk meneliti dan mengkaji mengenai riset ini dalam mengembangkan teori akademik yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik dan berguna bagi pemerintah desa supaya bisa mengelola anggaran desa selaras dengan akuntabilitas pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dari hasil studi pengamatan ini diharapkan bisa memperluas wawasan untuk peneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil studi pengamatan ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan demi kemajuan akademisi serta bisa menjadi bahan referensi serta acuan bagi penelitian selanjutnya untuk mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

c. Bagi Perangkat Pemerintah Desa

Penelitian berikut dilaksanakan supaya dapat bermanfaat bagi perangkat pemerintah desa terutama didalam proses pembuatan laporan keuangan anggaran desa supaya lebih meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa khususnya disemua desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi mengenai transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada khalayak umum sehingga tidak menimbulkan serta mencegah berbagai asumsi negatif yang timbul terhadap aparat pemerintah desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Stewardship theory termasuk kedalam teori agensi. *Stewardship theory* yaitu teori yang didasari oleh anggapan filosofis mengenai karakter manusia. Secara umum manusia dianggap bisa diberi kepercayaan, dan mempunyai rasa tanggung jawab jika diberi amanah dan bertindak secara jujur dan berintegritas (Lamo, 2015). Menurut Prasetyantoko (2008:84) asumsi *stewardship* mempunyai makna bahwa manusia berarti makhluk sosial dimana pada hakikatnya memerlukan bantuan orang lain guna hidup dan saling tolong menolong. Teori *stewardship* juga menggambarkan mengenai situasi keadaan dimana seorang manajer yang tujuan utamanya lebih memprioritaskan keperluan instansi dibandingkan keperluan individu (Donaldson dan Davis, 1991 dalam Fauzani, 2018). Berdasarkan *stewardship theory* menjelaskan keterkaitan erat antara kepuasan serta keberhasilan suatu instansi. Melalui usaha optimal nilai guna *stewart* serta *principal* maka kesuksesan organisasi dapat dicapai.

Teori *stewardship* ini juga menjelaskan kepentingan bersama yang merupakan dasar seorang *Stewart* dalam bertindak. Oleh karena itu, jika ada perbedaan keperluan antara *stewards* dengan *principals*, sehingga

steward berupaya bekerja sama guna melakukan tindakannya berdasarkan perilaku *principals* guna terlaksananya kepentingan umum demi terwujudnya tujuan instansi. Hal utama pada teori *Stewardship* yaitu pihak penerima amanah (*steward*) harus menyeimbangkan target sesuai target *principal*, akan tetapi tidak berarti penerima amanah (*steward*) juga tanpa mempunyai keinginan (Fadil, 2020).

Keterkaitan teori *stewardship* pada penelitian ini yaitu menerangkan mengenai keberadaan pemerintah desa (*steward*) saat mengerjakan tugas, fungsi dan juga tanggung jawabnya sehingga dapat memaksimalkan keahlian dan kemampuannya. Sehingga akan menjalankan tugasnya serta berbagai pengaruhnya dengan memegang teguh kejujuran dan integritas sehingga kesejahteraan masyarakat atau *principal* dapat dijamin. Pemerintah desa (*steward*) diminta agar dapat menerapkan *good government governance*. Salah satu prinsip utamanya yaitu akuntabilitas (Puspa & Prasetyo, 2020:284). Dalam penelitian ini, akuntabilitas yang dimaksud yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Jadi bisa diambil kesimpulan terkait teori *stewardship* yaitu teori guna menggambarkan bentuk kepemimpinan serta keterkaitan antara pemimpin dan pegawainya pada suatu instansi dengan memakai mekanisme situasional. Dalam hal itu Kepala desa serta aparatur desa selaku *steward* lebih cenderung guna melakukan tugasnya berdasar pada kemauan pemerintah pusat selaku *principals* yaitu dimana pemerintah

desa yang berperan sebagai *stewards* mempunyai kewajiban guna menerbitkan laporan atau informasi terkait dengan pengelolaan dana desa (DD) yang bersifat terbuka, integritas, atau dengan menggunakan sarana media massa dalam wujud penyajian laporan keuangan yang mudah diakses beberapa pihak terkait pengguna laporan menurut asumsi warga atau *principals* mempunyai hak mengetahui informasi tersebut.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa yaitu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki tugas pokok dalam menjalankan berbagai urusan baik keperluan rumah tangga desa maupun pemerintahan umum, memotivasi serta membina warga desa (Rohman, *et al.*, 2018:6). Selain itu pemerintah desa juga mempunyai arti sebagai lembaga pemerintahan yang berkewajiban untuk mengelola daerah ditingkat desa, dimana dalam pemerintahan desa mencakup pemdes serta badan permusyawaratan desa (BPD) (Mualifu, 2019:53).

Pemerintah desa juga merupakan aspek penyelenggaraan pemerintahan di desa, sehingga pemdes memiliki fungsi dan tugas utama yang harus dijalankan yaitu (Rohman, *et al.*, 2018:12):

- a. Tugas pokok pemerintah desa.
 - Melakukan segala keperluan rumah tangga desa serta keperluan pemerintahan secara umum.

- Menjalankan berbagai tugas pembantuan yang ditetapkan pemerintah baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
 - Membangun serta membina masyarakat desa.
- b. Fungsi pokok pemerintah desa.
- Fungsi Instruktif merupakan fungsi sebagai komunikasi satu arah. Dimana pemdes bertindak selaku komunikator yang menentukan bagaimana, apa, dan dimana pemerintah dijalankan dengan efektif.
 - Fungsi Konsultatif yaitu fungsi yang dipakai dalam dua arah. Hal itu dipakai guna upaya mengambil keputusan yang membutuhkan aspek pertimbangan serta memungkinkan diperlukan diskusi dengan warga desa.
 - Fungsi Partisipasi merupakan fungsi yang bersifat aktif, dimana pemerintah desa berupaya untuk mengaktifkan masyarakat desa dengan melibatkan warga dalam mengambil keputusan dan pelaksanaannya. Namun partisipasi bukan berarti masyarakat dapat berbuat semaunya, tetapi harus dilaksanakan secara terarah serta terkendali seperti saling berkerja sama tanpa mengambil atau mencampuri tugas utama dari aparat lain.
 - Fungsi Delegasi adalah fungsi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan atau wewenang dalam menentukan mana yang baik dengan otorisasi atau tanpa otorisasi dari pemerintah pusat.

- Fungsi Pengendalian berkaitan dengan cara kepemimpinan yang mampu mengatur kegiatan anggota secara terarah serta mengkoordinasi yang efektif, maka dapat tercapai target instansi. Untuk menjalankan fungsi ini, pemimpin bisa menjadikan kenyataan dengan berbagai aktivitas seperti sosialisasi, bimbingan, pengawasan, serta koordinasi.

Menurut Sujarweni (2015:8-13) Pemerintah desa terdiri dari aparaturnya yang memiliki tugas serta wewenang masing-masing yaitu diantaranya:

a. Kepala Desa.

Tugas Kepala Desa yaitu melakukan pembangunan untuk desa, pembinaan warga desa, menyelenggarakan pemerintahan desa, dan melaksanakan pemberdayaan terhadap warga desa.

b. Sekretaris Desa.

Tugas sekdes yaitu membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi desa dan juga dalam menyiapkan bahan untuk pembuatan laporan pelaksanaan pemdes.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD merupakan badan yang melakukan fungsi pemerintahan dimana anggotanya terdiri dari wakil penduduk desa sesuai wilayah yang telah ditentukan. Fungsi BPD antara lain:

- Bersama Kades melakukan pembahasan serta menyepakati rancangan peraturan desa.
- Melaksanakan pemantauan pada kinerja yang dilakukan Kades.
- Menyediakan wadah guna menampung serta menyalurkan aspirasi warga desa.

d. Pelaksana Teknis Desa.

Pelaksana teknis desa terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- Kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM) yang bertugas menolong kepala desa dalam melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, pembinaan ketertiban, pertahanan dan keamanan masyarakat, menyiapkan materi guna perumusan kebijakan penataan dalam menyusun hukum desa.
- Kepala urusan pembangunan (KAUR Pembangunan) bertugas menyiapkan perumusan strategi terkait teknis pengembangan ekonomi warga serta potensi yang tersedia di desa, mengelola administrasi pembangunan, dan mengelola pelayanan masyarakat.
- Kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA) yang bertugas mempersiapkan bahan guna perumusan teknis terkait penyusunan program terkait agama, serta melakukan program guna memberdayakan masyarakat serta sosial kemasyarakatan.
- Kepala urusan keuangan desa (KAUR KEU) bertugas menolong sekdes dalam melakukan pengelolaan sumber penerimaan yang ada

di desa, mengelola administrasi keuangan desa, melakukan persiapan materi untuk menyusun APBDes dan laporan keuangan yang diperlukan oleh desa.

- Kepala urusan umum (KAUR Umum) bertugas membantu sekdes guna melakukan tata usaha, administrasi umum, serta kearsipan mengelola inventaris aset desa, dan menyiapkan materi untuk rapat sekaligus laporan.

e. Pelaksana Kewilayahan.

Kepala Dusun (KADUS.) mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

- Membantu penyelenggaraan tugas Kades di daerah kerja yang telah ditetapkan.
- Melakukan keputusan serta kebijakan yang ditentukan Kades.
- Membantu Kades didalam aktivitas pembinaan serta kerukunan bagi warga desa.
- Melakukan pembinaan swadaya serta gotong royong antar masyarakat.
- Menyelesaikan segala tugas dari Kades.

Berdasarkan penjelasan wewenang dan tugas dari perangkat desa diatas, maka pemerintah desa dituntut dengan berbagai peraturan yang berlaku guna mampu mengelola dengan baik segala sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya aset.

Pengelolaan sumber daya. tersebut juga diharapkan sesuai asas pemerintahan mencakup bersih, baik, transparan, serta akuntabel.

3. Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 pasal 1 ayat 2, dana desa merupakan dana dimana sumbernya berasal dari APBN yang dikucurkan kepada desa melalui transfer pada anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau kota guna dipakai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Dana desa dikucurkan bagi setiap desa sebesar 10% dari APBN. Dimana pencairan dana desa dilakukan tanpa melalui perantara melainkan langsung diserahkan kepada desa, namun total nominal yang diberikan berbeda setiap desanya sesuai dengan jumlah penduduk, geografis desa, serta jumlah angka kematian. Hal tersebut menyebabkan pendapatan desa meningkat, sehingga diperlukan laporan pertanggungjawaban sesuai pedoman pada Permen Nomor 113 tahun 2014 (Sujarweni, 2015:16).

Menurut Yulianti, *et al.*, (2019:389) indikator yang digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan pengelolaan serta pemakaian dana desa sebagai berikut:

a. Pengelolaan

- Meningkatkan pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai keberadaan dana desa.

- Berupaya mendukung partisipasi masyarakat pada proses musyawarah terkait perencanaan serta pembangunan di desa.
- Memperluas wawasan dan memperbaiki kepercayaan warga desa terkait pertanggungjawaban pemakaian dana desa.

b. Pemakaian

- Kegiatan yang dibiayai wajib menyesuaikan rancangan yang usai disusun didalam APBDesa.
- Realisasi keuangan dituntut sesuai target yang sebelumnya sudah ditentukan.
- Meningkatnya pendapatan asli desa.
- Mampu menyerap tenaga kerja guna meningkatkan pendapatan sebagian orang.
- Besarnya jumlah penerima manfaat khususnya yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu.
- Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan dukungan pada pemakaian dana desa.

Dana desa dikelola dengan berpedoman terhadap beberapa asas (Sujarweni, 2015:27-30) yaitu antara lain:

- Transparan yang menjamin kebebasan atau akses untuk setiap orang yang membutuhkan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan.

- Akuntabel, dimana bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya serta penyelenggaraan kebijakan untuk entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan secara periode.
- Partisipatif merupakan unsur dimana setiap masyarakat desa memiliki hak guna terlibat pada setiap kegiatan baik melalui langsung ataupun tidak langsung didalam rangkaian guna pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintahan desa.

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian internal merupakan sebuah rencana dan metode instansi atau organisasi yang dipakai guna menjaga serta melindungi aset, menyajikan informasi akurat serta bisa dipercaya, meningkatkan efisiensi dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015:216). Melakukan pengendalian internal yaitu sebagai alasan yang utama guna memastikan proses mencapai tujuan agar bisa terlaksana serta dapat menurunkan tingkat resiko yang tidak diharapkan.

Sistem pengendalian internal pada pemerintah berdasarkan pada peraturan pemerintah no. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal merupakan suatu alur yang pasti terhadap pergerakan serta aktivitas yang dilaksanakan berkala oleh pemimpin instansi serta semua pegawai guna memberikan motivasi supaya target instansi bisa terwujud melalui aktivitas organisasi yang efisien dan efektif, kevalidan dalam menyampaikan laporan keuangan, penjagaan pada aktiva negara, serta

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam artian lain sistem pengendalian intern pemerintah berarti suatu sistem pengendalian intern yang dilaksanakan menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Mulyadi (2007:130) aspek pokok dari sistem pengendalian internal yaitu diantaranya:

- Struktur organisasi guna memilah secara tegas tanggung jawab fungsional.
- Sistem wewenang serta prosedur dalam pencatatan yang dapat melindungi aset, pendapatan, hutang serta beban.
- Praktik yang sehat saat melaksanakan tugas serta fungsi dari setiap anggota instansi.
- Pegawai yang mempunyai mutu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Terdapat lima aspek sistem pengendalian internal sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 antara lain :

a. Kegiatan Pengendalian.

Kegiatan Pengendalian diwujudkan dalam bentuk aktivitas pengendalian yang meliputi: pembinaan sumber daya manusia, review kinerja organisasi pemerintah, pencatatan akuntabilitas pada sumber daya, pemisahan fungsi, pengendalian pada pengelolaan sistem informasi, dan pengendalian wujud atas aset.

b. Penilaian Resiko.

Penilaian risiko yang terkait dengan probabilitas suatu peristiwa yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dan target organisasi, sehingga pemimpin instansi harus melaksanakan analisis risiko.

c. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian dapat direalisasikan dalam hal berikut yaitu kepemimpinan yang senantiasa kondusif, pendelegasian wewenang yang tepat, komitmen terhadap kompetensi, nilai etika, penegakan integritas, dan hubungan kerja yang lancar dan mempunyai kesan yang baik dengan instansi pemerintah yang berkaitan.

d. Informasi Dan Komunikasi.

Untuk dapat mencapai unsur SPIP ini, pimpinan organisasi harus bisa mencatat, mengidentifikasi, dan menyampaikan informasi dalam waktu dan wujud yang tepat. Komunikasi diharapkan efektif, maka dari itu membutuhkan sarana yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai bentuk dan sarana berkomunikasi. Sistem informasi diatur dan dikembangkan secara berkala.

e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Pemantauan terhadap kualitas kinerja SPI dilaksanakan oleh pemimpin instansi melalui pemantauan yang bertahap, evaluasi yang

dikerjakan secara terpisah dan penindak lanjutan atas hasil audit dan pemaparan.

Di Indonesia inspektorat daerah adalah badan perlindungan intern atau biasa disebut internal auditor didalam pemda. Berperan selaku pengawas intern, adanya inspektorat daerah sangat berpengaruh terutama dari sudut pandang fungsi dasarnya juga ialah melaksanakan pengawasan untuk semua aktivitas yang memiliki keterkaitan terhadap tugas serta peran aparatur daerah sesuai dengan APBD. Penyelenggaraan evaluasi pemerintah mengakibatkan peningkatan akuntabilitas *financial* melalui penilaian serta pemeriksaan pengendalian intern, manajemen resiko serta proses pada tata cara mengelola pemerintahan (Fadil, 2020).

Tujuan dari sistem pengendalian internal yaitu antara lain (Mulyadi, 2007:129):

- Menjaga aset instansi.
- Memeriksa ketelitian serta kepercayaan terhadap data akuntansi.
- Meningkatkan kemampuan (efisiensi).
- Mendukung ditaatinya kebijakan manajemen.

Menurut (Krismiaji, 2015:218) sistem pengendalian internal juga memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

- Merekrut pegawai yang berkualitas, memisahkan secara tegas tugas pegawai, melakukan pengawasan fisik secara efektif (Pengendalian preventif).

- Melaksanakan pengecekan ulang setiap data akuntansi (Pengendalian detektif)
- Melindungi data akuntansi (Pengendalian korektif).

Dari uraian beberapa tujuan sistem pengendalian yang dinyatakan oleh beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan:

- 1) Menjaga keamanan aset milik pemerintah desa.

Apabila aset yang dimiliki perusahaan tidak dapat dilindungi dengan pengendalian internal yang memadai, maka kekayaan fisik dapat dicuri dan disalahgunakan. Sama halnya dengan kekayaan fisik seperti aktivitas usaha, dokumen-dokumen penting dan keandalan data akuntansi juga harus dilindungi secara baik dan benar.

- 2) Memeriksa ketelitian serta keandalan data akuntansi.

Supaya bisa menyelenggarakan dengan baik, maka dalam mengelola dana desa juga harus dengan baik, jajaran staf desa harus memiliki informasi yang akurat. Berbagai informasi penting yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

- 3) Meningkatkan efisiensi.

Pengendalian internal dalam suatu pemerintahan desa ditujukan guna menghindari terjadinya kesalahan yang berulang serta tidak perlu dan pemborosan pada semua aspek pengelolaan dana desa, serta upaya pencegahan pemakaian sumber daya secara tidak terkendali.

4) Mensupport ditaatinya kebijakan manajemen.

Manajemen yang dimaksudkan yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyusun berbagai materi dan prosedur guna mencapai tujuan pemerintahan. Sistem pengendalian intern ditujukan guna meyakinkan bahwa seluruh aturan serta prosedur ini bisa dilakukan dan ditaati oleh pelaksana pemerintahan desa.

5. Kompetensi Pemerintah Desa

Definisi kompetensi yaitu kemampuan ataupun potensi personal guna menyelesaikan seluruh pekerjaannya, dimana kemampuan tersebut dipengaruhi dua aspek ialah kemampuan fisik serta kemampuan intelektual (Robbins, 2007:38). Definisi lain kompetensi menurut McClelland (dalam Sagala dan Rivai, 2009) yaitu keterampilan khusus yang dimiliki seseorang guna mempengaruhi langsung ataupun mampu memprediksi kinerja secara baik. Akan tetapi pada umumnya kompetensi berarti kecakapan, keterampilan, dan kemampuan seseorang.

Kompetensi mencakup perihal penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang memenuhi baik dari sikap dan perilaku guna melaksanakan pekerjaan. Kompetensi terbagi menjadi tiga bidang, yaitu antara lain: pengetahuan (knowledge), sikap atau tingkah laku (attitude) yang meliputi: etis, emosional dan spiritual kecerdasan), dan Keterampilan (*skill*) baik fisik maupun teknis (Agoes dan Ardana dalam Indriasih, 2014).

Menurut Spencer (dalam Sudarmanto, 2018:53) komponen kompetensi mencakup dalam beberapa hal yaitu:

- a. *Motives* yaitu seluruh hal yang secara konsisten dikehendaki seseorang serta bisa mengakibatkan tindakan seperti motif mengarahkan, menggerakkan, serta memfilter perilaku guna mencapai tujuan.
- b. *Knowledge* merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang didalam sektor tertentu.
- c. *Traits* merupakan berbagai ciri fisik serta beberapa responsif yang stabil terhadap beberapa keadaan maupun ketersediaan informasi.
- d. *Skill* merupakan kemampuan guna menyelesaikan tugas.
- e. *Self concept* merupakan nilai, tingkah laku, serta kesan pribadi pada seseorang.

Tingkat kompetensi kemampuan dan pengetahuan menegaskan karakteristik manusia yang dipunyai secara nyata dibandingkan tingkah lakunya. Sikap ataupun tingkah laku adalah wujud tersembunyi dari keterampilan serta terletak pada posisi pusat karakterteristik individu personal. Kompetensi juga mencerminkan hal yang wajib dikerjakan di instansi. Dengan melalui pengenalan ciri-ciri keterampilan dan pengetahuan seseorang yang dibutuhkan di tempat kerja yang mungkin terhadap tugas dan tanggung jawab akan dilakukan dengan efisien serta efektif. Oleh sebab itu, standar kualitas profesional dapat dicapai dengan mudah (Kompri, 2017).

Menurut Moeheriono (2017:30) terdapat tiga varian kompetensi yang dimiliki dalam sumber daya manusia (SDM) yaitu:

- a. Kompetensi personal merupakan keahlian dalam bekerja yang dimiliki pada diri individu serta mampu menggabungkan antara pengetahuan, kemampuan, serta tingkah laku yang berdasar pada pengalaman dan edukasi agar selama penyelenggaraan pekerjaan dapat berjalan profesional, efektif serta efisien. Kompetensi personal terbagi menjadi dua berikut ini:
 - Kompetensi *threshold* (minimum) adalah dasar kompetensi yang wajib dikuasai seseorang (membaca serta menulis).
 - Kompetensi *differentiating* adalah keterampilan guna memilah antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, mana yang berkinerja tinggi dan berkinerja rendah.
- b. Kompetensi jabatan merupakan kompetensi terpenting yang harus dimiliki serta mendapat perhatian khusus pihak manajemen guna menentukan jabatan bagi calon pekerja. Seorang pekerja supaya mampu menggapai tingkat kinerja yang bagus dan optimal, maka semestinya harus mempunyai keseimbangan antara penguasaan kompetensi personal dengan posisi yang diemban (kompetensi jabatan). Hal tersebut bisa terjadi kecocokan serta keselarasan dengan keterampilan yang dipunyainya. Kompetensi jabatan juga mempunyai beberapa jenis komponen dasar diantaranya:

- Kompetensi utama yaitu kompetensi yang harus ada dalam individu serta berkaitan dengan posisi jabatan dari suatu pekerjaan dalam ruang lingkup yang telah ditentukan. Supaya dalam penerapan jabatan tersebut berhasil sesuai rencana diperlukan: penemuan masalah serta solusi penyelesaiannya, manajemen perubahan, akuntabilitas, perencanaan strategik, kebijakan manajemen, kualitas pelayanan manajemen dan kerjasama.
 - Kompetensi pendukung yaitu kompetensi yang dibutuhkan guna mendukung serta menunjang terlaksananya penyelenggaraan jabatan tertentu, yang mencakup mengenai komunikasi dan teknologi informasi.
- c. Kompetensi organisasi merupakan kompetensi yang sangat berpengaruh karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan yang dicapai suatu organisasi. Faktor utama dari hal tersebut pastinya terletak pada sumber daya manusia, sehingga untuk mencapai tujuannya suatu organisasi membutuhkan visi dan misi. Selain itu juga dibutuhkan kepercayaan antar pegawai dengan pihak manajemen dan antar pegawai satu dengan lainnya. Adanya saling kepercayaan maka akan menumbuhkan motivasi pada diri masing-masing pegawai.

Dari penjelasan mengenai kompetensi sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi yaitu kemampuan mendasar yang dimiliki pada setiap diri seseorang serta sikap yang bisa

dipertimbangkan didalam menyelesaikan tugas dan pekerjaanya. Kompetensi juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kemampuan dan kinerja seseorang, sebab apabila seseorang memiliki kompetensi yang bagus maka sudah pasti kinerja orang tersebut bagus pula. Maka dari itu dalam pemerintahan desa kompetensi pemerintah desa sangatlah penting untuk diperhatikan sebab akan menjadi penentu faktor guna mecapai tujuan instansi.

6. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyampaikan informasi yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik untuk berbagai pihak terutama bagi yang memerlukan *information*. Transparansi mengacu pada kebebasan dalam mendapatkan informasi terkait dengan kepentingan khalayak umum yang secara langsung bisa diperoleh bagi yang berkepentingan (Mardiasmo, 2009:18). Transparansi dalam hal ini memperjelas pengertian dimana masyarakat mempunyai kesamaan hak serta akses guna mengetahui pemakaian anggaran sebab berhubungan dengan kepentingan serta argumen masyarakat, khususnya untuk memenuhi keperluan hidup semua masyarakat.

Krisna (2003) menyebutkan aspek transparansi mampu diukur dengan menggunakan beberapa indikator diantaranya yaitu:

- a. Mekanisme guna memberikan jaminan standarisasi serta keterbukaan atas seluruh penyelenggaraan layanan publik.
- b. Mekanisme guna memberikan fasilitas terhadap berbagai pertanyaan masyarakat mengenai pelayanan publik serta segala kebijakan terkait penyelenggaraan dibidang umum.
- c. Mekanisme guna memberikan fasilitas pelaporan serta pengungkapan fakta ataupun tindakan penyelewengan yang dilakukan aparatur publik dalam kegiatan pelayananan.

Transparansi juga mempunyai 3 aspek kritis antara lain sebagai berikut (Motik & Suryani, 2003):

- a. Keterkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*).
- b. Sistem serta kapasitas dibalik produksi dan jaminan informasi yang sistematis.
- c. Kejelasan peran serta tanggung jawab diantara lembaga sebagai bagian dari berbagai proses yang dibutuhkan transparansinya.

Ketiga aspek kritis di atas mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, dikarenakan adanya sistem informasi saja tidak akan cukup apabila tanpa adanya pemaparan mengenai peran serta tanggung jawab setiap instansi yang ikut serta didalam segala proses yang berlangsung atau yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu semuanya harus dijamin dengan adanya sistem yang pasti.

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang wajib diselenggarakan sebab hal tersebut dapat menimbulkan dampak positif sehingga harus mendapat respon positif juga dari pemerintah. Menurut Herlianto (2017:33) dengan adanya transparansi maka masyarakat bisa mendapatkan berita aktual serta factual. Masyarakat umum juga bisa memakai berita untuk:

- Memperbandingkan rencana program dengan kinerja keuangan.
- Menilai ada maupun tidak terjadinya tindak korupsi selama perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
- Dapat mengetahui sudah atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengetahui terkait hak dan kewajiban antar pihak seperti antara masyarakat dengan pemerintah serta dengan pihak lain yang terkait.

Transparansi atau yang bisa disebut keterbukaan pemerintah guna menyajikan informasi untuk pihak yang memerlukan informasi, dimana pemerintah harus menyajikan informasi keuangan dan informasi terkait lainnya kepada khalayak umum sehingga bisa digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan beberapa pihak yang memiliki kepentingan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi menjadi hal utama dalam penyelenggaraan berbagai fungsi pemerintah untuk melaksanakan seluruh mandat dari masyarakat. Pemerintah mempunyai wewenang dalam pengambilan berbagai keputusan penting yang bisa berdampak kepada warga, maka dari itu warga menuntut pemerintah guna mengungkapkan informasi nyata terkait hal yang dilaksanakan. Melalui transparansi, kecurangan sukar guna disembunyikan. Oleh karena itu transparansi dijadikan bagian penting sebab bisa melindungi uang rakyat dari tindakan korupsi.

7. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Berdasarkan perspektif tata ruang aksesibilitas merupakan suatu kondisi ataupun kesiapan atas hubungan tempat yang satu ke tempat lainnya, ataupun dapat juga berarti kemudahan personal guna dapat bergerak dengan nyaman dan aman (Koester, 2002 dalam Lewier, 2006). Akan tetapi Aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai bentuk kemudahan dari beberapa pihak (pemerintah) yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan guna mendapatkan informasi tentang keuangan daerah (Sari, 2017).

Selain itu juga aksesibilitas dapat berarti sebagai bentuk pemda dalam memberikan tanggung jawabnya untuk warga secara jujur serta transparan lewat pengungkapan informasi terkait laporan keuangan oleh

berbagai pihak yang memiliki kepentingan agar dengan mudah bisa mengaksesnya (Musthofa, 2012).

Akuntabilitas dikatakan efektif apabila aksesibilitas masyarakat pada laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Akses bisa didapatkan dari berbagai media seperti internet, majalah, radio, koran dan television. Hak warga guna mengakses laporan anggaran merupakan suatu bukti pertanggungjawaban serta pengelolaan (Mardiasmo, 2009:10).

Dalam mengukur aksesibilitiitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah digunakan dua indikator yaitu (Sande, 2013) :

- Laporan keuangan mudah diakses.
- Laporan keuangan diinformasikan pada media massa.

Uraian diatas menyimpulkan bahwa aksesibilitas berarti suatu kemudahan yang diberikan oleh suatu pihak (pemerintah daerah) kepada masyarakat umum terkait laporan pertanggungjawaban dari tugas yang telah dilaksanakan. Akses yang disediakan pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dengan mudah informasi yang dibutuhkan terkait kinerja pemerintah, sehingga dapat digunakan publik sebagaimana mestinya.

8. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas publik yaitu salah satu kewajiban pihak pemegang amanah guna mempersembahkan penyajian, pertanggungjawaban, serta memaparkan semua kegiatan yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh pihak yang memberikan amanah (*principal*) serta mempunyai hak dan wewenang guna mendapatkan pertanggungjawaban atas tugas yang telah diserahkan (Mardiasmo, 2009:20).

Akuntabilitas publik dalam konteks organisasi pemerintah mempunyai definisi pemberi informasi atas pelaksanaan aktivitas terkait pemakaian sumber daya publik bagi pihak yang memberikan amanah (Mahmudi, 2007). Pada struktur pemerintahan, akuntabilitas memiliki makna bagian dari kewajiban dalam mempertanggungjawabkan serta menjelaskan kinerja juga tindakan orang, pemimpin instansi, maupun badan hukum bagi pihak yang mempunyai hak serta wewenang guna mendapatkan penjelasan dan pertanggung jawaban (Fauzani *et.al.*, 2018).

Mardiasmo (2009:21) menguraikan bahwa adanya elemen dalam akuntabilitas yang wajib diselenggarakan organisasi bidang publik. Adapun dimensi tersebut ialah berikut ini:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan *abuse of power* atau penghindaran penyalahgunaan posisi jabatan. Akan tetapi yang berkaitan dengan akuntabilitas hukum yaitu jaminan dalam kepatuhan

hukum serta pada peraturan berlaku dan diisyaratkan guna pemakaian sumber dana publik.

b. Akuntabilitas proses.

Akuntabilitas proses berkaitan dengan prosedur apakah yang dipakai guna melakukan tugas dengan tepat serta kecukupan mengenai sistem informasi akuntansi (SIA), prosedur administrasi, serta sistem informasi manajemen (SIM).

c. Akuntabilitas program.

Akuntabilitas ini berkaitan dengan anggapan mengenai apakah tujuan yang telah diresmikan mampu untuk diwujudkan ataupun tidak, serta apakah sudah melakukan pertimbangan program alternatif yang dapat membagikan hasil optimum tentunya dengan memakai budget seminimal mungkin.

d. Akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban dari pemerintah baik pusat ataupun wilayah, dimana didasarkan pada berbagai kebijakan yang dipakai pemerintah terhadap anggota dewan serta masyarakat luas.

Pengelolaan keuangan desa merupakan semua aktivitas perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan desa. pengelolaan keuangan desa didasarkan pada berbagai aspek seperti aspek akuntabel, transparan, dan partisipatif yang

dilaksanakan secara tertib serta disiplin terhadap anggaran. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu semua aktivitas yang dimulai dari perencanaan hingga pada pertanggung jawaban yang berkaitan dengan seluruh hak serta kewajiban desa bisa dievaluasi menggunakan berbagai hal berupa barang maupun uang (Puspa *et.al.*, 2020).

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Fauzi (2020:18) terdapat beberapa tahapan dalam akuntabilitas. Tahapan akuntabilitas tersebut terdiri dari berikut:

1) Tahap Perencanaan.

Proses perencanaan yaitu tahapan penting sebab ditahapan ini perumusan aktivitas serta penganggaran yang ditetapkan. Terdapat beberapa pihak yang bertanggungjawab atas keputusan yang diambil yaitu kades atau lurah, BPD, sekdes, camat bahkan sampai pada bupati/walikota. Sehingga dapat disadari bahwa akuntabilitas dimulai dari tahapan ini. Akuntabilitas dapat diwujudkan dengan cara melibatkan warga desa didalam proses perencanaan.

Agar bisa memakai dana desa, kepala desa terlebih dahulu harus mempunyai anggaran desa terkait APBDesa, dimana dalam penyusunan APBDesa harus diawali penyusunan Raperdes mengenai APBDesa oleh sekdes yang selanjutnya akan diusulkan kepada kepala desa guna mendapatkan otorisasi serta dibahas bersama BPD. Setelah

selesai dibahas, selanjutnya Raperdes APBDesa ditetapkan sebagai Peraturan Desa serta diajukan kepada Camat untuk diteruskan kepada bupati ataupun walikota guna dilaksanakan penilaian.

Hasil dari evaluasi selanjutnya akan ditindaklanjuti guna perbaikan sesuai dengan koreksi yang tersedia. Apabila telah selesai dikoreksi, maka APBDesa diresmikan sebagai dokumen yang berguna sebagai acuan penyelenggaraan aktivitas yang memerlukan dana desa.

2) Tahap Pelaksanaan.

Kepala desa selaku pemegang tanggung jawab tertinggi didalam pengelolaan keuangan desa serta mendapat bantuan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang berisi aparatur desa seperti sekretaris desa, bendahara, serta kepala seksi. Oleh karena itu seluruh pihak yang bertanggungjawab didalam pengelolaan keuangan desa diwajibkan mengetahui hal-hal yang harus dijaga seperti akuntabel, tertib, transparan, dan disiplin anggaran.

Posisi sekretaris desa yaitu selaku koordinator pelaksana teknis dimana sekretaris desa wajib menguasai berbagai hal seperti: merancang serta melakukan prosedur dalam pengelolaan APBDesa, merancang Raperdes terkait APBDesa sampai dengan perubahan APBDesa, serta menyusun pelaporan terkait pertanggungjawaban dari penyelenggaraan APBDesa, dan melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan aktivitas yang telah disahkan didalam APBDesa,

terakhir melaksanakan pemeriksaan terhadap segala bukti yang berkaitan dengan penerimaan serta pengeluaran APBDesa. Selain itu, sekretaris desa memiliki tugas utama yaitu menyusun seluruh dokumen terkait perencanaan serta anggaran, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban pemakaian anggaran. Oleh sebab itu, sekdes diharuskan mempunyai kompetensi yang memadai dalam berbagai bidang tersebut.

Kepala seksi bertugas selaku pelaksana kegiatan yang sesuai dengan bagian tugasnya sehingga diperlukan kompetensi yang memadai guna melakukan tugasnya dalam merancang strategi penyelenggaraan aktivitas sekaligus menjadi tanggung jawabnya, bersama lembaga kemasyarakatan desa melakukan aktivitas yang sudah diresmikan pada APBDes, handle penyelenggaraan aktivitas, serta menyampaikan laporan kemajuan terkait penyelenggaraan aktivitas kepada kades.

Bendahara bertindak mengurus financial sehingga harus mempunyai kemampuan yang memadai juga guna mengerjakan tugas seperti menerima, menyetorkan, menyimpan, menatausahakan, serta memberikan pertanggungjawaban terkait pemasukan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

3) Tahap Penatausahaan.

Penatausahaan keuangan desa mencakup segala aktivitas pendataan terkait pemasukan dan pengeluaran, penutupan buku serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan oleh bendahara desa kepada kepala desa. Penatausahaan dalam pemasukan dan pengeluaran memakai sarana antara lain buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

4) Tahap Pelaporan.

Untuk memelihara akuntabilitas, kepala desa bisa memakai segala media yang tersedia, sebagai contoh bisa menggunakan metode pelaporan. Pelaporan sebagai salah satu sarana wajib yang disepakati dalam segala peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa ketika melaksanakan pekerjaan, wewenang, hak serta kewajibannya harus disesuaikan dengan pasal 48 PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yaitu sebagai berikut:

- Laporan pelaksanaan pemdes pada setiap akhir periode anggaran kepada Bupati ataupun Walikota.
- Laporan pelaksanaan pemdes disetiap berakhirnya masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
- Laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan yaitu secara tertulis kepada BPD disetiap akhir periode anggaran.

5) Tahap Pertanggungjawaban.

Akuntabel merupakan bagian aspek yang wajib dijadikan acuan kepala desa guna mengelola keuangan desa. Perihal tersebut bermakna bahwa pada setiap aktivitas yang memakai anggaran desa diharuskan bisa dipertanggungjawabkan baik dengan vertikal yaitu pimpinan yang lebih tinggi (selaku pemberi tugas) ataupun secara horizontal bagi warga desa (masyarakat). Laporan pertanggungjawaban terkait realisasi penyelenggaraan APBDesa ialah bagian tidak dapat dipisahkan dengan laporan pelaksanaan pemerintahan desa.

Dari penjelasan terkait akuntabilitas diatas, bisa disimpulkan bahwa kesuksesan akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi dengan isi strategi serta konteks dalam mengimplementasikannya. Namun, didalam prosesnya sangat dipengaruhi oleh sikap pemerintah dalam pembinaan serta pengawasan pengelolaan ADD serta respon terhadap argumen yang ada dimasyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dapat menyokong kesuksesan dari program yang sudah direncanakan.

Oleh karena itu, tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah memberikan ruang politik untuk warga desa agar menjadi lebih aktif dan terlibat langsung didalam pelaksanaan pengawasan pembangunan, maka memiliki potensi menghasilkan proses pembangunan yang akuntabel, responsif partisipatif serta transparan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan aspek yang bisa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ini mengacu pada penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai variabel serta hasil yang beda. Uraian penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan Sari (2017) meneliti mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan dan gaya kepemimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten IndraGiri Hulu. Hasil penelitian tersebut yaitu sistem pengendalian internal dan aksesibilitas mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan daerah, akan tetapi penyajian laporan keuangan serta gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang berada di Kabupaten IndraGiri Hulu.

Penelitian Rosyidi (2018) yang menganalisis tentang pengaruh transparansi, kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemdes dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi empiris pada seluruh desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). Penelitian ini memakai metode kuantitatif, purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Populasinya yaitu semua aparatur pemerintah desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dengan setiap desa akan diambil responden yang sesuai dengan kriteria yaitu Camat Kecamatan

Salo, Sekretaris Camat Kecamatan Salo, Kabid Pengurus dana desa, Kepala Desa, BPD 3 orang, Sekretaris desa 1 orang, 5 Pegawai desa, Masyarakat tiap desa 10 orang. Sehingga jumlah sampelnya 123 responden. Hasil penelitian menyatakan bahwa transparansi, kompetensi, dan *internal control system* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo.

Penelitian yang dilakukan Fauzani, *et al.*, (2018) terkait dengan analisis persepsi pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Pada studi pengamatan ini digunakan teknik purposive sampling, sampel yang didapat berjumlah 100 responden. Hasil studi pengamatan ini menyimpulkan penyajian laporan pertanggungjawaban serta aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Yulianti, *et al* (2019) tentang pengaruh kompetensi, teknologi informasi, sistem akuntansi, internal control terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa (studi empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). Populasi penelitiannya yaitu 16 desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan memakai teknik sensus dimana semua populasi dijadikan sampel sebab minimnya jumlah populasi sehingga setiap desa diambil 4 responden (kades, sekdes, bendahara, serta kepala keuangan).

Metode analisis datanya yaitu regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi aparatur pengelola keuangan desa, siskeudes, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Pangkalan Kuras.

Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dilakukan oleh Sweetenia, *et al* (2019) yang berjudul pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemdes. Populasi dalam studi pengamatan tersebut yaitu perangkat desa disekitar pemerintah Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampelnya ialah purposive sampling. Hasil penelitiannya yaitu dimana spi, kompetensi, serta penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pemdes.

Penelitian lain dilakukan oleh Mualifu, *et al* (2019) mengenai pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (studi empiris pada seluruh desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga), objek penelitian ini yaitu semua desa yang berada pada Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dengan total 19 desa. Data yang dipakai yaitu data primer (kuesioner). Metode pemilihan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling dimana seluruh sampel penelitian ada 76 responden. Penelitian tersebut menyimpulkan SPI, transparansi,

kompetensi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemdes dalam pengelolaan ADD.

Penelitian juga dilakukan Musdalifah (2020) yang terkait dengan pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon. Populasi pada penelitian tersebut yaitu semua perangkat desa di Kecamatan Temon. Sampel yang dipakai peneliti yaitu total 45 responden. Kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian tersebut menyatakan peran aparat desa serta aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun lain halnya dengan siskeudes menunjukkan tidak terdapat pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Selain itu juga penelitian lain dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020) tentang pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasinya yaitu Kades dan bendahara desa se-Kota Pariaman dengan total 110 orang dengan membagikan kuesioner secara langsung. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel kompetensi dan SPI memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun berbeda dengan aksesibilitas yang tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas.

Hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan guna referensi dalam penelitian ini bisa diringkas dalam tabel dibawah ini, yaitu antara lain:

Tabel 2.1
Studi Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan, dan gaya kepemimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. (Sari, 2017)	Independen(X): Penyajian laporan keuangan, SPI, gaya kepemimpinan. Dependen (Y) : Transparansi dan juga Akuntabilitas	Aksesibilitas serta SPI mempengaruhi transparansi dan juga akuntabilitas manajemen keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan dan gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang berada di kabupaten IndraGiri Hulu.
2.	Pengaruh transparansi, kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi empiris pada seluruh desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). (Rosyidi, 2018)	Independen (X): Transparansi, sistem pengendalian internal, kompetensi. Dependen (Y): Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD	Transparansi, kompetensi, <i>internal control system</i> berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemdes pada pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo.
3.	Pengaruh kompetensi, teknologi informasi, sistem akuntansi, internal control terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa (studi empiris di kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan tahun 2018) (Yulianti, <i>et al.</i> ,2019)	Independen (X): Sistem akuntansi, kompetensi, internal control, teknologi informasi. Dependen (Y): Akuntabilitas pemdes dalam mengelola keuangan desa	Kompetensi aparatur pengelola anggaran desa, pemanfaatan teknologi informasi, siskeudes dan juga pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras.

Lanjutan...

4.	Analisis persepsi pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga (Fauzani, <i>et al.</i> , 2018)	Independen (X) : Penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas Dependen (Y): Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa	Penyajian laporan pertanggungjawaban serta aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan dana desa. di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
5.	Pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah desa. (Swietenia, <i>et al.</i> , 2019)	Independen (X): Kualitas penyajian laporan keuangan kompetensi, sistem pengendalian internal. Dependen (Y): Akuntabilitas pemerintah desa	Kualitas penyajian laporan keuangan kompetensi, sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pembedes.
6.	Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (studi empiris pada seluruh desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga) (Mualifu, <i>et al.</i> , 2019)	Independen (X): Transparansi, Kompetensi, SPI, dan komitmen organisasi Dependen (Y): Akuntabilitas pemerintah mengelola ADD	Variabel transparansi, SPI, kompetensi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pembedes dalam mengelola ADD di semua desa yang ada pada wilayah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Lanjutan...

7.	Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Puspa, <i>et al.</i> , 2020)	Independen (X): Kompetensi pemdes, SPI, aksesibilitas laporan keuangan. Dependen (Y): Akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi berbeda dengan aksesibilitas yang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.
8.	Pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan Keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan Temon . (Musdalifah, 2020)	Independen (X): Peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan Dependen (Y) : Akuntabilitas pengelolaan keuangan	Studi pengamatan ini membuktikan variable peran perangkat desa dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi siskeudes tidak mempunyai pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon.

Sumber: data yang diolah, 2021

C. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka pemikiran didefinisikan sebagai bagian utama dari proses penelitian khususnya penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Definisi kerangka pemikiran itu sendiri yaitu intisari teori yang sudah dikembangkan serta bisa mendasari dalam perumusan hipotesis. Teori tersebut dipakai dengan tujuan memberikan jawaban maupun solusi dari penyelesaian masalah yang menerangkan hubungan antar variabel bebas

dengan variabel terikat berdasarkan teoritis yang dibahas (Sekaran & Bougie, 2017:86). Sesuai dengan argumen tersebut, maka kerangka pikir pada studi pengamatan ini yaitu sebagai berikut:

1.) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal merupakan proses integral dalam kegiatan dan perbuatan dimana dilaksanakan dengan rutin seluruh semua anggota organisasi atau perusahaan, baik oleh pimpinan beserta semua karyawan guna memberikan kepercayaan yang andal demi terwujudnya tujuan instansi. Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) menjelaskan bahwa aparat pengawas organisasi pemerintah merupakan bagian sebagai sarana dalam pembinaan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah yang juga membuktikan SPIP sangat berperan didalam proses penyelenggaraan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa (Fadil, 2020).

Keterkaitan sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu dimana akuntabilitas dapat diwujudkan dengan kegiatan pengendalian melalui review kinerja instansi pemerintah yang semakin baik serta pencatatan akuntabilitas pada sumber daya dan pengendalian atas pengelolaan dana desa dengan menjaga kepemimpinan agar tetap kondusif sehingga penilaian resiko dapat dilakukan guna mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu juga guna

mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan sarana komunikasi yang efektif dan berguna dalam situasi apapun untuk menyampaikan informasi yang akurat sehingga pemantauan pada kualitas kinerja sistem pengendalian internal dapat dilakukan. Dengan melalui pemantauan yang bertahap dengan diawali dengan evaluasi sampai pada pemaparan hasil, maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (DD) dapat diwujudkan melalui sistem pengendalian intern (Puspa, 2020).

Hal itu selaras dalam penelitian Primayani (2014) yang menyimpulkan secara parsial bisa diketahui bahwa bertambahnya tingkat pengendalian internal, maka bertambah pula akuntabilitas pengelolaan pada keuangan daerah. Selain itu juga didukung dari hasil penelitian Sari (2017) dan Widyatama, *et al* (2017) menunjukkan sistem pengendalian internal perangkat desa dapat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemdes ketika mengelola alokasi dana desa (ADD).

2.) Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi aparatur pelaksana dana desa yaitu bagian keahlian penuh yang dibutuhkan oleh perangkat desa supaya dalam mengelola dana desa bisa mengembangkan segala aspek yang mampu diwujudkan melalui pemakaian kepintaran terkait dengan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan juga sikap atau tingkah laku (*attitude*) guna

mendorong keberhasilan pembangunan pada desa secara maksimal (Sweetenia, 2019).

Perangkat desa yang mempunyai kompetensi memadai cenderung dapat mendorong kesuksesan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi memiliki keterkaitan dengan sikap ataupun watak seseorang serta pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait tata cara pengelolaan dana desa yang akuntabel. Kompetensi didalam pribadi seseorang cenderung kedalam karakteristik baik maupun tinggi yang selanjutnya akan dibenarkan sesuai kenyataan serta dilihat dari hasil pekerjaannya. Namun sebaliknya, apabila individu memiliki tingkat kompetensi rendah, sehingga dia condong mempunyai tingkat kinerja rendah pula atau tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai batas waktu (*deadline*) yang ditentukan dan tidak dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Yulianti, 2019).

Hasil studi pengamatan Mada, *et al* (2017), menyimpulkan kompetensi SDM yaitu bagian aspek yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dipertegas dengan riset yang dilakukan Sugiarti & Yudianto (2017) membuktikan kompetensi SDM berpengaruh signifikan pada akuntabilitas pengelolaan ADD.

3.) Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Transparansi merupakan tersedianya informasi secara umum dengan akurasi yang tinggi dan tepat waktu dalam proses pembuatannya terkait dengan kebijakan publik. Transparansi dapat diwujudkan dengan adanya ketersediaan informasi yang mudah diterima oleh masyarakat, dimana masyarakat sangat membutuhkan keterbukaan mengenai informasi keuangan terkait dana desa (Hanifah & Praptoyo, 2015).

Keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas yaitu dimana transparansi dapat dikatakan tercapai apabila pada penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip *good governance* yang merupakan hal utama disetiap instansi yang mencakup keterbukaan informasi laporan pertanggungjawaban serta rasa keadilan, hal itu berfungsi supaya instansi terkait mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Maka dari itu, dalam setiap instansi pemerintah diwajibkan melaksanakan prinsip transparansi untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Fauzani, 2018).

Dalam penelitian Rosyidi (2018) dan dipertegas Mualifu, *et al*, (2019) yang menyimpulkan transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa saat mengelola alokasi dana desa yang artinya ketika tingkat transparansi semakin tinggi menunjukkan

bertambah tinggi pula bagi pemdes saat mengelola akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

4.) Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

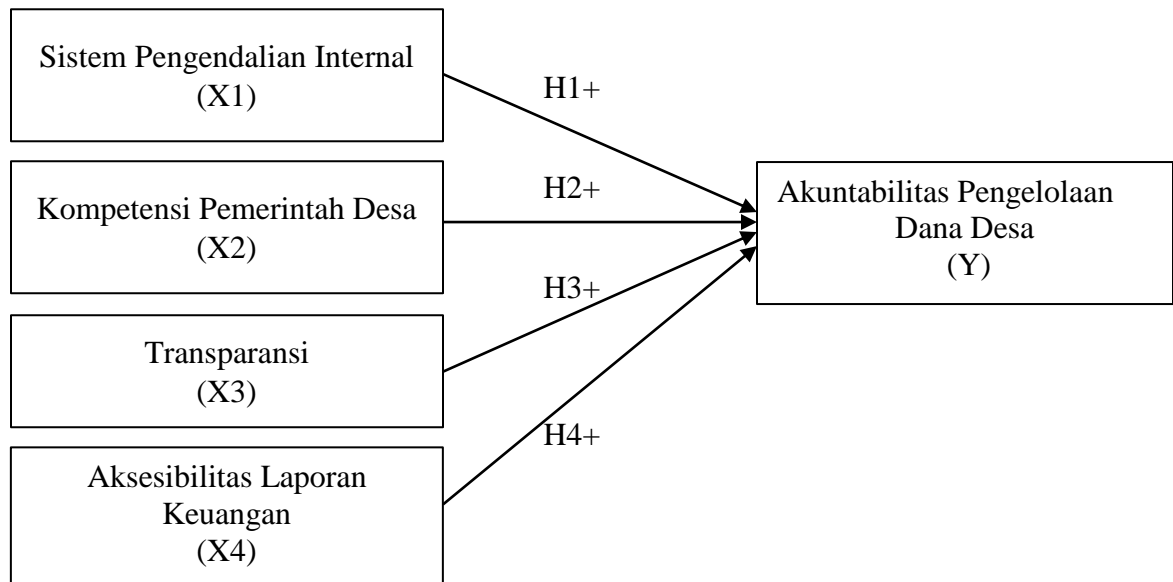
Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan yang disediakan pemda terkait akses yang kedepannya memberikan keuntungan bagi warga beserta seluruh pihak yang berkepentingan guna mengambil data yang telah disediakan dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Pemerintah memiliki kewajiban guna menyediakan akses informasi untuk seluruh warga supaya akuntabilitas pengelolaan keuangan bisa dievaluasi. Warga desa mempunyai hak yang merupakan hak guna mendapatkan kebenaran informasi yang terdiri atas hak guna mendapatkan keterangan secara transparan dari berbagai masalah yang bisa menimbulkan konflik masyarakat (James, 2003). Laporan terkait pengelolaan dana desa dari pemdes adalah bagian dari wujud hak publik yang wajib diterima oleh masyarakat dari pemerintah desa.

Secara umum aksesibilitas yang baik ditentukan pada akses masyarakat terhadap laporan pertanggungjawaban serta pelaporan temuan yang dengan mudah bisa dibaca dan dipahami oleh pihak yang mempunyai kepentingan. Laporan keuangan yang dibuat pemdes akan berguna jika mampu memberikan akses untuk berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, sehingga sesuai dengan target pengalokasian

dana desa yaitu guna pembangunan desa serta memberikan kesejahteraan secara optimal bagi warga desa (Mardiasmo, 2009).

Hal tersebut senada dengan pernyataan Sukhemi (2012) dan dikuatkan oleh penelitian Superdi (2017) dan Fauzani (2018) yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dimana meningkatnya aksesibilitas laporan keuangan bisa menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat terwujud.

Sesuai dengan penjelasan dibagian sebelumnya, sehingga kerangka konseptual di dalam penelitian ini bisa dirumuskan berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis yaitu pernyataan secara sementara yang bisa diuji serta mampu menentukan hal apa yang harus diketahui pada data empiris peneliti (Sekaran & Bougie, 2017:94). Hipotesis juga bisa berarti jawaban sementara atas suatu persoalan dimana kebenarannya wajib dibuktikan secara jelas, logis serta dapat diuji. Berdasarkan landasan teori serta kerangka pemikiran pada uraian sebelumnya, sehingga diajukan hipotesis berikut:

- H1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H2 : Kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H3 : Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H4 : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam studi pengamatan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif menjelaskan peristiwa, situasi, dan keadaan di lapangan secara akurat dan sistematis. Sedangkan metode kuantitatif yaitu metode *positivistik* sebab berpedoman terhadap filsafat *positivisme* (Sugiyono, 2016:7). Disebut metode kuantitatif dikarenakan data yang digunakan memakai analisis data yaitu angka (numerik) dengan metode statistika serta memakai pengujian hipotesis perihal akuntabilitas pengelolaan dana desa (DD).

B. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan daerah yang mencakup baik subjek maupun objek yang memiliki kualitas serta kriteria khusus yang ditetapkan peneliti dengan tujuan guna dipahami, selanjutnya dapat diambil benang merahnya sebagai kesimpulan (Sugiyono, 2016:80). Selain itu, menurut Supangat (2017) menyatakan bahwa populasi merupakan gabungan beberapa objek yang ditujukan sebagai bahan penelitian dan memiliki ciri kuantitas serta karakteristik sama dan telah dipilih peneliti guna mendapatkan kesimpulan. Didalam penelitian ini, populasi yang diambil yaitu perangkat

desa pada 19 Desa yang berada di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Sampel yaitu anggota yang terdiri dari total serta karakteristik yang dipunyai populasi itu (Sugiyono, 2016:81). Teknik penentuan sampel yang dipakai yaitu sampel jenuh yang berarti teknik penentuan sampel, dimana seluruh bagian populasi dipakai untuk sampel (Sugiyono, 2016:85). Perihal tersebut diterapkan sebab terbatasnya total populasi pada penelitian. Pemilihan responden pada 19 Desa untuk dijadikan sampel dengan setiap desa diambil 4 responden diantaranya:

- 1) Kepala desa (Kades).
- 2) Sekretaris desa (Sekdes).
- 3) Bendahara desa.
- 4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Maka dari itu, total sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 76 responden dan akan diolah menggunakan program *Spss* ver.22. Berikut ini daftar nama-nama desa yang terletak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yaitu :

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Nama Desa	Total Responden
1.	Kendaldoyong	4
2.	Kendalrejo	4
3.	Kendalsari	4

Lanjutan...

4.	Klareyan	4
5.	Karangasem	4
6.	Kalirandu	4
7.	Pegundan	4
8.	Pesucen	4
9.	Petanjungan	4
10.	Panjunan	4
11.	Loning	4
12.	Nyamplungsari	4
13.	Sirangkang	4
14.	Serang	4
15.	Bulu	4
16.	Iser	4
17.	Temuireng	4
18.	Tegalmlati	4
19.	Widodaren	4
Total		76

Sumber: diolah untuk penelitian, 2021

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu pemahaman konsep yang dipakai guna mempermudah penulis dalam penggunaan konsep yang nanti diterapkan dilokasi penelitian (Effendi dan Singarimbun, 2002). pengertian konseptual pada studi pengamatan ini yaitu sebagai berikut:

a. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang mendapat perhatian khusus peneliti, dimana variabel terikat ini berarti variabel pokok yang menjadi aspek dan berlaku selaras yang ada pada pengamatan (Sekaran dan Bougie, 2017: 77). Variabel terikat pada studi pengamatan ini ialah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu proses pengelolaan keuangan desa yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, kemudian pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan ketat bisa disampaikan serta dipertanggungjawabkan kepada badan pengawas daerah serta khususnya masyarakat yang mempunyai hak untuk menuntut dan mengetahui proses pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya terhadap amanat rakyat yang telah diberikan (Halim, 2017).

b. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas merupakan variabel guna mempengaruhi variabel terikat baik itu positive maupun negative. Dengan arti lain apabila ada variabel independen menunjukkan terdapat juga variabel dependen yang diikuti penurunan serta kenaikan variabel terikat. Hal tersebut terjadi karena variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas (Sekaran & Bougie, 2017:79). Variabel independen pada studi pengamatan ini diantaranya:

1. Sistem Pengendalian Internal (X1)

Sistem pengendalian internal yaitu bagian yang bisa ditentukan dengan sumber daya manusia serta sistem teknologi yang bermanfaat guna menolong instansi agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan (Sari, 2017).

2. Kompetensi Pemerintah Desa (X2)

Kompetensi pemerintah desa yaitu perpaduan antara wawasan serta keterampilan yang mempunyai relevan sesuai pekerjaan guna menyelesaikan tugas maupun pekerjaan sesuai dengan patokan yang berlaku (Airsoft Smith dan Milership, 2007: 73 dalam Dia respati, 2017).

3. Transparansi (X3)

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah untuk upaya menginformasikan yang kelak diberikan untuk masyarakat umum supaya tanpa timbul kecurigaan pada bentuk pelaporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

4. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4)

Aksesibilitas laporan keuangan ialah bentuk kemudahan untuk seseorang guna mendapatkan informasi terkait laporan keuangan (Mulyana, 2006). Definisi lain aksesibilitas laporan keuangan yaitu kemudahan akses yang ditujukan pemerintah daerah kepada masyarakat serta berbagai pihak yang berkepentingan yang akan

memberikan keuntungan guna mengambil data yang telah disajikan serta dapat dipakai sebagaimana mestinya (Musdalifah, 2020).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yaitu batasan penjelasan mengenai variabel yang hendak dipakai pada pengamatan serta telah tercantum beberapa kriteria yang hendak dipakai guna memperkirakan variabel yang saling berkaitan. Definisi operasional variabel dalam studi pengamatan ini diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Sistem Pengendalian Internal (X1) Sweetenia (2020)	Lingkungan Pengendalian	1. Kebijakan Kepala Desa 2. Peran BPD 3. Struktur organisasi	Interval
	Kegiatan Pengendalian	1. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa 2. Pengendalian sistem keuangan 3. Kelancaran hubungan kerja dengan instansi lain	
	Informasi dan Komunikasi	1. Konsistensi 2. Kejelasan 3. Efisien serta efektif	
	Penilaian Resiko	1. Perubahan pada lingkungan kegiatan 2. Sistem informasi yang baru 3. Perubahan prosedur serta peraturan	
	Pemantauan pengendalian intern	1. Evaluasi kegiatan 2. Fungsi audit internal	

Lanjutan...

Kompetensi Pemerintah Desa (X2) Puspa (2020)	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	1. Pengetahuan atau wawasan 2. Kemampuan dalam meningkatkan Pengetahuan 3. Pengetahuan terkait teknologi	Interval
	Keterampilan (<i>Skill</i>)	1. Kemampuan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi 2. Keahlian khusus dalam pekerjaan 3. Kemampuan dalam bekerjasama	
	Sikap atau perilaku (<i>Attitude</i>)	1. Kesopanan dan Keramahan 2. Inisiatif terhadap pekerjaan 3. Citra pribadi seseorang	
Transparansi (X3) Rosyidi (2018)	Keterbukaan	1. Kejujuran dalam pelaporan 2. Tugas dan tanggung jawab pelaporan 3. Sistem informasi anggaran 4. Keterlibatan masyarakat	Interval
	Kejelasan	1. Pelaporan keuangan yang jelas 2. Pelaporan hasil kerja tepat waktu 3. Pelaporan penunjang kinerja	
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4) Christy dan Heni (2016)	Ketersediaan Informasi	1. Kecukupan informasi 2. Tugas dan tanggung jawab 3. Upaya menyediakan laporan pertanggungjawaban	Interval
	Kemudahan Diakses	1. Keterbukaan di media massa 2. Kemampuan memberikan akses kepada masyarakat 3. Hubungan kerjasama antar lembaga 4. Akses yang tersedia	
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) Fadil (2020)	Tahap Perencanaan	1. Lembaga desa 2. Masyarakat 3. Tugas dan tanggung jawab sekretaris desa	Interval

Lanjutan...

	Tahap Pelaporan	1. Kesesuaian prosedur 2. Ketepatan pertanggungjawaban pelaporan	
	Tahap Pertanggung Jawaban	1. Ketelitian 2. Laporan secara terbuka dan tepat waktu 3. Kelengkapan pelaporan pertanggungjawaban	

Sumber: diolah untuk penelitian, 2021

D. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini agar mendapatkan data akurat, relevan, serta valid maka dipakai teknik pengumpulan data dengan metode kuesioner. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:170) kuesioner merupakan sejumlah daftar pernyataan tertulis yang sebelumnya sudah dirumuskan, yang kemudian responden bisa mencatat jawabannya, umumnya pada alternatif diartikan secara gampang. Secara umum kuesioner disusun guna mengumpulkan banyak data kuantitatif dan bisa diserahkan secara pribadi untuk responden.

Kuesioner yang dipakai pada studi pengamatan ini ialah kuesioner dengan memakai skala *likert*. Skala *Likert* ialah skala yang tersusun atas lima tingkatan jawaban (Ghozali, 2018) diantaranya:

Sangat Setuju (SS) : 5

Setuju (S) : 4

Netral (N)	: 3
Tidak Setuju (TS)	: 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	: 1

E. Uji Kualitas Data

Dalam studi pengamatan ini dapat dipakai berbagai uji guna menetapkan ketepatan serta keandalan juga kualitas pada sebuah riset yang dilaksanakan memakai berbagai uji sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas yaitu uji yang dipakai guna memastikan valid maupun tidak valid atas kuesioner yang diserahkan langsung pada responden (Ghozali, 2018). Kevalidan suatu kuesioner diketahui apabila pertanyaan dalam kuesioner bisa mengidentifikasi terkait perihal yang akan diukur pada kuesioner. Oleh karena itu uji validitas bisa dilaksanakan dengan korelasi bivariate dari setiap nilai dalam indikator serta jumlah keseluruhan nilai konstruk dengan beberapa ketentuan yaitu jika terdapat nilai r -hitung lebih besar dari nilai r -tabel serta nilai positif, sehingga disimpulkan valid ($0,000 \geq 0,05$), akan tetapi jika nilai r -hitung lebih kecil dari nilai r -tabel, maka bisa disimpulkan tidak sah ($0,000 \leq 0,05$) (Ghozali, 2018:52).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu uji yang dipakai guna mengukur kuesioner termasuk juga indikator terkait variabel (konstruk) (Ghozali, 2018:45).

Bisa diungkapkan reliabel dalam variabel apabila menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 dengan memakai aplikasi SPSS (Nunnally, 1994 dalam Ghozali 2018).

F. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dipakai untuk mendeskripsikan mengenai data yang ditentukan dari *Mean*, varian, standar deviasi, minimum dan maximum (Ghozali, 2018). Dalam studi pengamatan ini, statistik deskriptif menggambarkan demografi dari responden penelitian yaitu nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, serta lamanya masa kerja.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji ini yaitu anggapan mendasar pada analisis multivariate dengan menguji apakah model regresi pada variabel residual memiliki distribusi normal ataupun tidak. Dalam studi pengamatan ini memakai uji normalitas *one sample kolmogorov smirnov* guna mengambil keputusan dengan pertimbangan yaitu apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 berarti dikatakan data berdistribusi normal, begitupun sebaliknya apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dapat dinyatakan tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dipakai guna mengetes pada bentuk regresi dideteksi terdapatnya korelasi antara satu variabel bebas dengan lainnya. Model regresi dikatakan bagus apabila tanpa terdapat korelasi antar variabel bebas. Uji Multikolinieritas ini menguji antar satu variabel independen dengan lainnya dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) (Ghozali, 2018:107).

Cara pengukuran itu dipakai dengan tujuan guna membuktikan variabel mana yang diterangkan oleh variabel independen lain. Apabila nilai tolerance $>0,10$ ataupun nilai VIF <10 maka menunjukkan tidak ada ataupun terjadi multikolinearitas atau dapat diambil kesimpulan tidak adanya korelasi antar variabel bebas begitupun sebaliknya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu uji model regresi yang berkaitan perbedaan variance dari residual antara satu studi pengamatan ke studi pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2018:137). Jika antara penelitian satu dengan penelitian lainnya melihatkan variance residual stabil maka dikenal Homoskedastisitas serta apabila hasilnya beda maka dikenal Heteroskedastisitas. Homoskedastisitas menunjukkan bentuk regresi yang bagus ataupun tidak terjadinya

Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui baik terdapat ataupun tidak ada heteroskedastisitas dilihat melalui pengamatan grafik Plot pada rentang nilai dugaan variabel terikat ZPRED serta residualnya SRESID.

Terdapat atau tidak adanya data heteroskedastisitas bisa ditemukan pada terlihatnya bentuk tertentu yang ada dalam grafik scatterplot dengan rentang antara SRESID dan ZPRED, dimana Y didefinisikan Y yang diprediksi, serta X sebagai residual atau dengan kata lain rentang antara Y prediksi sampai Y sebenarnya yang sudah distudentized.

Adapun landasan analisisnya yaitu apabila terdapat bentuk tertentu, maka titik-titik akan menunjukkan bentuk tertentu baik melebar, bergelombang, maupun menyempit, sehingga akan menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Akan tetapi apabila tanpa adanya bentuk yang terlihat dengan jelas, maka titik-titik akan tersebar baik keatas maupun kebawah yaitu antara angka 0 disumbu Y, jadi hal itu menyimpulkan tanpa adanya heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu analisis uji yang dipakai guna mengetahui pengaruh satu variabel ataupun lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen yaitu apakah variabel independen mempunyai keterkaitan positif ataupun negatif serta guna

memperkirakan skor variabel dependen jika skor variabel independen terjadi penambahan ataupun pengurangan. Berikut ini persamaan regresi linear berganda yaitu :

$$\hat{Y} = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Keterangan:

\hat{Y} : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

X_1 : Sistem Pengendalian Internal

X_2 : Kompetensi

X_3 : Transparansi

X_4 : Aksesibilitas Laporan Keuangan

a : Konstanta

b_1-b_4 : Koefisien regresi variabel X

e : Standar error (tingkat kesalahan yang masih bisa ditolerir)

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Pada dasarnya uji statistik t menggambarkan sejauh mana pengaruh antara satu variabel bebas secara personal dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Uji statistik t dipakai guna menunjukkan hasil pengujian terhadap pengaruh nyata yang disebabkan bagian variable bebas secara pribadi terhadap variable terikat.

Uji statistik t dilaksanakan melalui membedakan antara skor t-tabel dengan t-hitung. Analisis tersebut juga dipakai guna mengetahui tabel coefficients pada hasil keluaran SPSS sesuai ketentuan yaitu akan signifikan apabila r-value $<0,05$ maka H1 diterima. Tetapi sebaliknya apabila tidak signifikan jika r-value $>0,05$ maka H1 ditolak.

b. Uji Statistik F (Kelayakan Model)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel- variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui variabel- variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan value pada kolom Sig. dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika p-value $>$ derajat keyakinan (0,05) maka H1 dan H2 ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, begitupun sebaliknya. Demikian juga untuk F hitung dan F tabel. Jika F hitung $>$ F tabel maka H1 dan H2 diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, begitu pula sebaliknya.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dipakai guna mengukur sampai mana kemampuan bentuk alam menjelaskan jenis variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Koefisien determinasi mempunyai tujuan guna mengetahui keberadaan variabel terikat, dimana diterangkan pada regresi. Ketika nilai R^2 berkisar pada rentang 0-1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), akan tetapi apabila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak terjadi hubungan sempurna, demikian apabila $R^2 = 1$ sehingga ada keterkaitan rentang variasi Y dengan X yang bisa dijelaskan oleh X.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Petarukan

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Petarukan terletak di ketinggian 8 m diatas permukaan laut dengan jarak dari barat ke timur kurang lebih 3,5 km sedangkan jarak dari utara ke selatan yaitu kurang lebih 8 km. Kecamatan Petarukan memiliki luas wilayah 81,29 km² atau 7,29% dari kabupaten Pemalang yang terdiri dari 66,84% atau sekitar 8.435 hektar wilayah pertanian dan sisanya yaitu 33,16% atau sekitar 2.695 hektar merupakan wilayah non pertanian. Wilayah pertanian terbagi menjadi sawah dan non sawah, dimana daerah yang dijadikan sawah seluas 5.252 hektar mencakup irigasi dan tadah hujan sedangkan sisanya yaitu daerah non sawah mencakup kebun dan tambak.

Kecamatan Petarukan terdiri atas dataran pantai yang meliputi Desa Nyamplungsari dan desa Kendalrejo, serta sebagian besar merupakan dataran rendah yang dilalui oleh sungai atau kali buatan Belanda (Kali Waluh, Kali Sibanteng, dan Kali Jati). Selain itu Kecamatan Petarukan mempunyai batas-batas wilayah sbb:

- Sebelah Utara yaitu laut Jawa.
- Sebelah Timur yaitu Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Ulujami.
- Sebelah Selatan yaitu Kecamatan Ampelgading.
- Sebelah Barat yaitu Kecamatan Taman.

2. Kependudukan

Penduduk yang tercatat di Kecamatan Petarukan yaitu berjumlah 173.517 jiwa yang terdiri atas 88.278 penduduk laki-laki dan 85.239 penduduk perempuan. Kelurahan Petarukan mempunyai penduduk terbanyak yaitu berjumlah 20.956 jiwa. Sedangkan desa Kalirandu merupakan wilayah terpadat penduduknya dengan kepadatan 5.429 jiwa per km². Adapun desa yang mempunyai kepadatan penduduk paling sedikit yaitu Desa Panjunan dengan total penduduk 3.942 jiwa. Komposisi penduduk produktif dengan rentang usia 15-64 tahun sebanyak 120.402 jiwa atau 69,39%, sedangkan penduduk dengan usia 0-14 tahun dan diatas 65 tahun masing-masing sebanyak 41.621 jiwa dan 11.494 jiwa.

3. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di kecamatan Petarukan relatif lengkap, sejumlah sekolah dan madrasah berdiri serta tersebar di wilayah kecamatan. Selain pendidikan negeri, di kecamatan ini juga terdapat

sejumlah pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta. Secara ringkas dapat dinyatakan pada tabel dibawah ini jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Petarukan yaitu:

Tabel 4.1
Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Petarukan

Tingkat Sekolah	Negeri	Swasta	Total
Taman Kanak-kanak (TK)	-	-	54
Sekolah Dasar (SD)	74	6	80
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	6	6	12
Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan(SMA/SMK)	1	1	2

4. Anggaran Dana Desa Setiap Desa di Kecamatan Petarukan

Tabel 4.2
Anggaran Dana Desa

No	Nama Desa	Anggaran dana desa (Rp)
1.	Kendalsari	1.903.882.000
2.	Widodaren	1.649.306.000
3.	Karangasem	1.116.852.000
4.	Petanjungan	1.536.626.000
5.	Serang	1.948.549.000
6.	Kalirandu	1.835.268.000
7.	Iser	1.316.673.000

Lanjutan...

8.	Sirangkang	1.229.544.000
9.	Pesucen	1.541.944.000
10.	Temuireng	1.438.361.000
11.	Panjunan	1.226.582.000
12.	Kendaldoyong	1.784.017.000
13.	Pegundan	2.145.604.000
14.	Bulu	1.075.068.000
15.	Tegalmlati	1.696.944.000
16.	Loning	1.900.424.000
17.	Klareyan	2.184.030.000
18.	Kendalrejo	1.704.743.000
19.	Nyamplungsari	1.934.421.000

Sumber: Kecamatan Petarukan dalam angka, 2020.

5. Pemerintahan

Kecamatan Petarukan terdapat sebanyak 19 desa dan 1 kelurahan dimana 6 desa berstatus pedesaan (Petanjungan, Panjunan, Serang, Tegalmlati, Nyamplungsari dan Kendalrejo) dan 14 desa berstatus perkotaan (Kendaldoyong, Klareyan, Kendalsari, Kalirandu, Karangasem, Sirangkang, Iser, Pegundan, Bulu, Loning, Petarukan, Pesucen, Widodaren, dan Temuireng). SDM yang mengelola Pemerintahan Desa

sudah cukup memadai dimana perangkat desa didominasi lulusan SLTA serta sarjana, hal ini menunjukkan kenaikan kualitas pendidikan perangkat desa dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dan cenderung bertambah setiap tahunnya. Semakin meningkatnya perangkat desa dengan tingkat pendidikan diploma serta sarjana, diharapkan mampu meningkatkan SDM di desa yang akan menuju pada perbaikan kinerja perangkat desa.

Kecamatan Petarukan terbagi menjadi 103 RW (rukun warga) dan 813 RT (rukun tetangga), dimana kelurahan Petarukan adalah wilayah yang paling banyak memiliki rukun warga yaitu 13 RW , 113 RT, serta 8 dusun, sedangkan desa Bulu merupakan desa yang paling sedikit warganya yaitu hanya mempunyai 1 dusun, 2 RW dan 20 RT.

B. Hasil Penelitian

1. Identifikasi Responden

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 76 responden dengan 49 item pernyataan yaitu untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) berjumlah 14 item pernyataan, variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X2) berjumlah 9 item pernyataan, variabel Transparansi (X3) dengan 7 item pernyataan, variabel Aksesibilitas laporan keuangan (X4) dengan 7 item pernyataan, serta untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dengan total 8 item pernyataan. Hasil penelitian dari 76 responden

perangkat desa di setiap desa yang terletak di Kecamatan Petarukan diperoleh data berikut ini:

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.3
Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	61	80%
2.	Perempuan	15	20%
Total		76	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.3 diatas memperlihatkan 76 responden yaitu perangkat desa di Kecamatan Petarukan dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 61 orang (80%) dan perempuan berjumlah 15 orang (20%). Hasil data tersebut menunjukkan mayoritas responden merupakan laki-laki dengan proporsi 80% lebih besar dibandingkan dengan responden perempuan.

b. Umur Responden

Tabel 4.4
Identifikasi Responden Berdasarkan Umur Responden

No	Umur	Jumlah	Presentase
1.	21-30 Tahun	5	6%
2.	31-40 Tahun	9	12%
3.	41-50 Tahun	34	45%

Lanjutan..

4.	≥ 51 Tahun	28	37%
Total		76	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat 76 responden perangkat desa di Kecamatan Petarukan sesuai perolehan data bahwa yang berumur 21-30 tahun sebanyak 5 orang (6%), yang berumur 31-40 tahun sebanyak 9 orang (12%), yang berumur 41-50 tahun sebanyak 34 orang (45%), serta yang berumur diatas 51 tahun sebanyak 28 orang (37%). Maka dengan itu minoritas responden terdapat pada kisaran usia 21-30 tahun dengan total 5 orang, dan mayoritas umur responden terdapat pada rentang usia 41-50 tahun dengan 34 orang.

c. Pendidikan Terakhir

Tabel 4.5

Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1.	SMA	43	57%
2.	D3	8	10%
3.	S1	25	33%
4.	S2	0	0%
Jumlah		76	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan SMA yaitu sebanyak 43 orang (57%), pendidikan D3 sebanyak 8 orang (10%), pendidikan S1 sebanyak 25 orang (33%), serta tidak terdapat satu pun perangkat desa dengan tingkat pendidikan S2.

d. Masa Kerja

Tabel 4.6
Identifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah	Presentase
1.	1-5 Tahun	56	74%
2.	6-10 Tahun	11	15%
3.	11-15 Tahun	1	1%
4.	16-20 Tahun	4	5%
5.	≥ 21 Tahun	4	5%
Jumlah		76	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2021.

Tabel 4.6 diatas menunjukkan responden penelitian ini yaitu perangkat desa di Kecamatan Petarukan yang telah bekerja selama 1-5 tahun sebanyak 56 orang (74%), bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 11 orang (15%), bekerja selama 11-15 tahun hanya 1 orang (1%), bekerja selama 16-20 tahun sebanyak 4 orang (5%), dan yang bekerja diatas 21 tahun sebanyak 4 orang (5%). Maka dengan itu mayoritas responden yang

bekerja sebagai perangkat desa selama rentang waktu 1-5 tahun sebanyak 56 orang.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dipakai guna memastikan valid tidaknya kuesioner (Ghozali, 2018:51). Uji validitas dilakukan dengan cara mengoreksi skor dari jawaban responden pada setiap pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid (sah) jika nilai R hitung $>$ R tabel dengan nilai signifikansi 0,05 (5%) untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dengan uji sebanyak 76 sampel (df = 76-2 maka table df ke-74 yaitu 0,2257). Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Uji Validitas
Variabel Sistem Pengendalian Internal (X1)

Item Pernyataan	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
1	0,727	0,2257	Valid
2	0,650	0,2257	Valid
3	0,589	0,2257	Valid
4	0,637	0,2257	Valid
5	0,640	0,2257	Valid

6	0,720	0,2257	Valid
7	0,716	0,2257	Valid
8	0,685	0,2257	Valid
9	0,748	0,2257	Valid
10	0,598	0,2257	Valid
11	0,759	0,2257	Valid
12	0,757	0,2257	Valid
13	0,707	0,2257	Valid
14	0,598	0,2257	Valid

Sumber: Olah data SPSS versi 22, 2021

Variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X2)

Item Pernyataan	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
1	0,727	0,2257	Valid
2	0,760	0,2257	Valid
3	0,765	0,2257	Valid
4	0,829	0,2257	Valid
5	0,699	0,2257	Valid
6	0,795	0,2257	Valid
7	0,653	0,2257	Valid
8	0,801	0,2257	Valid
9	0,750	0,2257	Valid

Sumber: Olah data SPSS versi 22,2021

Variabel Transparansi (X3)

Item Pernyataan	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
1	0,864	0,2257	Valid
2	0,866	0,2257	Valid
3	0,837	0,2257	Valid
4	0,755	0,2257	Valid
5	0,895	0,2257	Valid
6	0,748	0,2257	Valid
7	0,778	0,2257	Valid

Sumber: Olah data SPSS versi 22, 2021

Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4)

Item Pernyataan	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
1	0,766	0,2257	Valid
2	0,783	0,2257	Valid
3	0,841	0,2257	Valid
4	0,688	0,2257	Valid
5	0,903	0,2257	Valid
6	0,790	0,2257	Valid
7	0,818	0,2257	Valid

Sumber: Olah data SPSS versi 22, 2021

Variabel Akuntabilitas (Y)

Item Pernyataan	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
1	0,755	0,2257	Valid
2	0,744	0,2257	Valid
3	0,814	0,2257	Valid
4	0,756	0,2257	Valid
5	0,782	0,2257	Valid
6	0,732	0,2257	Valid
7	0,685	0,2257	Valid
8	0,807	0,2257	Valid

Sumber: Olah data SPSS versi 22, 2021

Dilihat dari hasil pengujian validitas diatas dapat diketahui seluruh butir pernyataan kuesioner baik variabel independen maupun variabel dependen adalah valid (sah) karena memiliki nilai r hitung lebih besar dibandingkan r tabel ($n=76$) = 0,2257, sehingga bisa dinyatakan seluruh butir pernyataan variabel yang dipakai dalam penelitian ini layak dipakai sebagai instrumen penelitian serta dinyatakan valid (sah).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dipakai guna mengetahui keandalan (reliabel) kuesioner yang dapat dilihat dari konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45). Suatu variabel dinyatakan reliabel

(handal) jika menunjukkan nilai *cronbach alpha* $> 0,70$ dengan ketentuan jika r hitung $>$ nilai *cronbach alpha* sehingga item tersebut dikatakan reliabel (stabil). Hasil pengujian reliabilitas bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Uji Reliabilitas

Variabel	r hitung	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0,907	0,70	Reliabel
Kompetensi Pemerintah Desa (X2)	0,902	0,70	Reliabel
Transparansi (X3)	0,915	0,70	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4)	0,898	0,70	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,888	0,70	Reliabel

Sumber: Olah Data SPSS versi 22, 2021

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.8 diatas menunjukkan variabel sistem pengendalian internal mempunyai r hitung sebesar 0,907, r hitung kompetensi pemerintah desa sebesar 0,902, transparansi dengan r hitung 0,915, r hitung aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,898, serta r hitung akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,888. Maka dari itu seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *cronbach alpha* diatas 0,70 sehingga bisa dikatakan keseluruhan konsep pengukur dari masing-masing variabel pada kuesioner layak dipakai sebagai instrumen penelitian serta dinyatakan reliabel (handal).

3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mempunyai fungsi guna memberikan gambaran suatu data dalam penelitian yang dilihat dari mean, maksimum, minimum, serta standar deviasi (Ghozali, 2018:19). Hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal	76	42	70	60,54	5,763
Kompetensi Pemerintah Desa	76	27	45	38,09	4,231
Transparansi	76	18	35	29,79	3,838
Aksesibilitas Laporan Keuangan	76	19	35	28,74	3,800
Akuntabilitas	76	24	40	34,86	3,603
Valid N (listwise)	76				

Sumber: Output data SPSS versi 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 data analisis statistik deskriptif yang sudah diolah menunjukkan:

- a. Variabel sistem pengendalian internal mempunyai nilai minimum 42 dan maksimum 70, dengan nilai rata-rata 60,54 dan standar deviasi 5,763 sehingga dapat dinyatakan data deskriptif pada variabel sistem pengendalian internal baik karena nilai rata-rata (*Mean*) lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi.

- b. Variabel kompetensi pemerintah desa mempunyai nilai minimum 27 dan maksimum 45, dengan nilai rata-rata 38,09 dan standar deviasi 4,231 sehingga dapat dinyatakan data deskriptif pada variabel kompetensi pemerintah desa baik karena nilai rata-rata (*Mean*) lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi.
- c. Variabel transparansi mempunyai nilai minimum 18 dan maksimum 35, dengan nilai rata-rata 29,79 dan standar deviasi 3,838 sehingga dapat dinyatakan data deskriptif pada variabel transparansi baik karena nilai rata-rata (*Mean*) lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi.
- d. Variabel aksesibilitas laporan keuangan mempunyai nilai minimum 19 dan maksimum 35, dengan nilai rata-rata 28,74 dan standar deviasi 3,800 sehingga dapat dinyatakan data deskriptif pada variabel aksesibilitas laporan keuangan baik karena nilai rata-rata (*Mean*) lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi.
- e. Variabel akuntabilitas mempunyai nilai minimum 24 dan maksimum 40, dengan nilai rata-rata 34,86 dan standar deviasi 3,603 sehingga dapat dinyatakan data deskriptif pada variabel akuntabilitas baik karena nilai rata-rata (*Mean*) lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan guna menguji model regresi apakah variabel pengganggu (residual) mempunyai distribusi normal atau tidak.

Pada penelitian ini memakai uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov guna mengambil sebuah keputusan. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka bisa dikatakan data berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka data dinyatakan tidak normal. Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.10:

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,49917287
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,076
	Negative	-,074
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dimana lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat dinyatakan data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dipakai guna mengetes pada bentuk regresi dideteksi terdapatnya korelasi antara satu variabel bebas dengan lainnya.

Model regresi dikatakan bagus apabila tanpa terdapat korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Untuk mengujinya bisa dilihat melalui nilai *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria apabila nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$ maka variabel dapat dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas begitupun sebaliknya.

Tabel 4.11
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,259	1,947		2,187	,032		
Sistem Pengendalian Internal	,138	,051	,220	2,702	,009	,367	2,724
Kompetensi Pemerintah Desa	,151	,071	,177	2,136	,036	,353	2,829
Transparansi	,257	,097	,274	2,659	,010	,230	4,343
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,308	,105	,325	2,939	,004	,199	5,014

Sumber: output data SPSS 22, 2021.

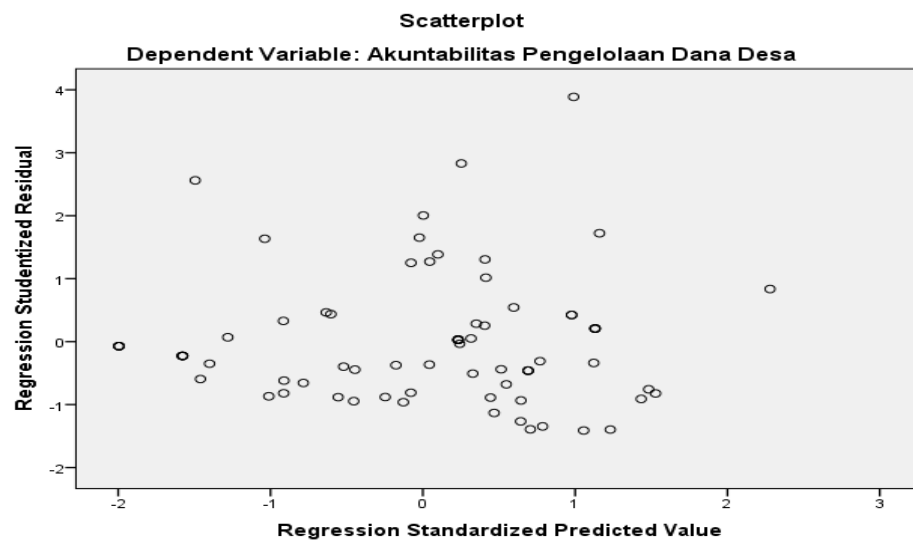
Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui berikut ini:

- 1) Nilai VIF dari sistem pengendalian internal 2,724, nilai VIF kompetensi pemerintah desa sebesar 2,829, nilai VIF transparansi sebesar 4,343, dan nilai VIF dari aksesibilitas laporan keuangan sebesar 5,014 sehingga hasil nilai VIF setiap variabel independen menunjukkan tidak lebih besar dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas.

2) Nilai *tolerance* sistem pengendalian internal 0,367, nilai *tolerance* kompetensi pemerintah desa sebesar 0,353, nilai *tolerance* transparansi sebesar 0,230, dan nilai *tolerance* aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,199 sehingga hasil dari tiap-tiap nilai *tolerance* variabel independen lebih besar dari 0,10 yang menunjukkan dilihat dari sisi nilai *tolerance* tidak terjadi multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu uji model regresi yang berkaitan perbedaan variance dari residual antara satu studi pengamatan ke studi pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2018:137). Apabila tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas serta dibawah angka 0 dan pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar. 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot diatas menunjukkan tidak ditemukan pola tertentu, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

5. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu variabel ataupun lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:95). Hasil perhitungan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,259	1,947		2,187	,032
Sistem Pengendalian Internal	,138	,051	,220	2,702	,009
Kompetensi Pemerintah Desa	,151	,071	,177	2,136	,036
Transparansi	,257	,097	,274	2,659	,010
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,308	,105	,325	2,939	,004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Output SPSS versi 22,2021.

Hasil uji regresi linear diatas menunjukkan angka yang berada pada *unstandardized coefficients betta* sehingga didapatkan persamaan regresi linear berganda berikut:

$$\hat{Y} = 4,259 + 0,138 X_1 + 0,151 X_2 + 0,257 X_3 + 0,308 X_4 + e$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 4,259 memiliki makna bahwa tanpa adanya variabel sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 4,259.
- b. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,138 artinya setiap variabel sistem pengendalian internal mengalami peningkatan, maka akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 31,8% di Kecamatan Petarukan.
- c. Koefisien regresi variabel kompetensi pemerintah desa bernilai sebesar 0,151 artinya apabila variabel kompetensi pemerintah desa mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 15,1% di Kecamatan Petarukan.
- d. Koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,257 berarti setiap variabel transparansi mengalami peningkatan, maka akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 25,7% di Kecamatan Petarukan.

- e. Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,308 artinya setiap variabel aksesibilitas laporan keuangan mengalami peningkatan, maka akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 30,8% di Kecamatan Petarukan.

6. Uji Hipotesis

a. Uji T (Uji Parsial)

Uji statistik t dipakai guna menunjukkan hasil pengujian terhadap pengaruh nyata yang disebabkan bagian variable bebas secara pribadi terhadap variable terikat (Ghozali, 2018:99). Uji ini memiliki tujuan mengetahui tabel coefficients pada hasil keluaran SPSS sesuai ketentuan yaitu akan signifikan apabila $r\text{-value} < 0,05$ maka H_1 diterima. Tetapi sebaliknya apabila tidak signifikan jika $r\text{-value} > 0,05$ maka H_1 ditolak.

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,259	1,947		2,187	,032
Sistem Pengendalian Internal	,138	,051	,220	2,702	,009
Kompetensi Pemerintah Desa	,151	,071	,177	2,136	,036
Transparansi	,257	,097	,274	2,659	,010
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,308	,105	,325	2,939	,004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka dapat diperoleh interpretasi berikut:

- 1) Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai koefisien yang bertanda positif 0,138 dengan nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ artinya variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,009 < 0,05$ maka dinyatakan hipotesis diterima.
- 2) Variabel Kompetensi Pemerintah Desa memiliki nilai koefisien positif 0,151 dengan nilai signifikansi sebesar $0,036 < 0,05$ artinya variabel kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,036 < 0,05$ maka dinyatakan hipotesis diterima.
- 3) Variabel Transparansi memiliki nilai koefisien positif 0,257 dengan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$ artinya transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,010 < 0,05$ maka dinyatakan hipotesis diterima.
- 4) Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien positif 0,308 dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ artinya variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,004 < 0,05$ maka dinyatakan hipotesis diterima.

b. Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dengan membandingkan value pada kolom Sig. dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika p-value > derajat keyakinan (0,05) yang artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	804,844	4	201,211	84,751	,000 ^b
	Residual	168,564	71	2,374		
	Total	973,408	75			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi

Sumber: Ouput data SPSS versi 22, 2021.

Hasil uji simultan diatas menunjukkan nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $84,751 > F$ tabel 2,50 sehingga dapat disimpulkan model regresi yang dibangun telah memenuhi kriteria *fit*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas mampu menjelaskan keragaman dari akuntabilitas pengelolaan dana desa serta variabel sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi dan aksesibilitas

laporan keuangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa).

c. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi yang didapatkan melalui nilai *adjusted R square* pada model regresi dipakai guna menunjukkan besaran variabel terikat yang bisa diuraikan oleh variabel-variabel bebas. Nilai *Adjusted R²* apabila berkisar 0-1 bermakna semakin kuat kemampuan variabel bebas bisa menjelaskan fluktuasi variabel terikat (Ghozali, 2018:101).

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,909 ^a	,827	,817	1,541

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Olah data SPSS versi 22, 2021.

Hasil pengujian diatas menunjukkan besarnya pengaruh variabel sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,817 atau 81,7% serta sisanya 18,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada studi pengamatan ini.

C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil pengamatan berikut:

1. Untuk menguji hipotesis pertama, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan hasil uji nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, nilai R_{hitung} $0,907 > 0,70$ (*cronbach alpha*), nilai *tolerance* $0,367 > 0,10$, VIF $2,724 < 10$, nilai koefisien $0,138$ dan tingkat signifikansi $0,009$ lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$, maka hal ini menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan dengan makna lain H_1 diterima.

Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Unsur pengendalian internal yang baik seperti lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian, serta penilaian resiko dari aparatur pemerintah desa akan menunjang kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa secara akuntabel (Sweetenia, 2020). Selain itu juga pengimplementasian sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang benar dan baik dalam pemerintah desa dapat mencegah terjadinya penyelewengan terhadap dana desa serta momentum dana desa yang diberikan pengelolaan kepada pemerintah desa dapat mencapai

tujuannya yaitu mempercepat pembangunan di desa sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat (Puspa, 2020).

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Arfiansyah (2020), Yulianti *et al.*, (2019), dan Yudianto (2018) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana sistem pengendalian intern bisa memberikan keyakinan memadai dalam suatu proses pelaksanaan pemerintahan desa guna pengelolaan dana desa sesuai perundang-undangan agar kriteria akuntabilitas dapat dipenuhi. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Mutmainah dan Pramuka (2017), Khasanah (2020), serta Pahlawan *et al.*, (2020) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena tim pengendalian internal dalam pemerintah desa belum mempunyai pengetahuan yang memadai terkait pengelolaan dana desa yang akuntabel.

2. Untuk menguji hipotesis kedua, kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan hasil uji nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, nilai R_{hitung} $0,902 > 0,70$ (*cronbach alpha*), nilai *tolerance* $0,353 > 0,10$, VIF $2,829 < 10$, nilai koefisien $0,151$ dan tingkat signifikansi $0,009$ lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$, sehingga bisa dinyatakan kompetensi pemerintah desa berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan dengan makna lain H2 diterima.

Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sesuai dengan teori *stewardship* dimana sifat manusia bisa dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab (Lamo, 2015). Pemberian dana desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang bervariasi serta adanya beberapa titik kritis didalam pengelolaan keuangan desa pastinya akan menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa (Mada *et al.*, 2017). Sumber daya manusia yang kompeten, memadai serta bisa diandalkan maka akan mendukung seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam pelaporan pertanggungjawaban kegiatan pemerintah desa kepada masyarakat sehingga akan terwujud tata kelola keuangan desa yang baik dan akuntabel (Yulianti, 2019).

Hasil penelitian ini selaras dengan studi pengamatan terdahulu yang dilakukan Puspa (2020), Wahyuni *et al.*, (2019), serta Rosyidi (2018) yang mengatakan kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana semakin besar kompetensi yang dimiliki perangkat desa maka semakin bagus pula akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Namun penelitian ini bertolakbelakang dengan riset Subroto (2009), Widyatama & Novita (2017), serta

Sweetenia *et al.*, (2018) menyimpulkan kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang disebabkan rendahnya kompetensi SDM aparatur desa yang menjadi faktor penghambat dalam mengelola dana desa yang akuntabilitas serta kurangnya kompetensi guna monitoring sekaligus evaluasi yang kurang efektif, dimana menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian ketika mengelola alokasi dana desa.

3. Untuk menguji hipotesis ketiga, transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan hasil uji nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, nilai R_{hitung} $0,915 > 0,70$ (*cronbach alpha*), nilai *tolerance* $0,230 > 0,10$, VIF $4,343 < 10$, nilai koefisien $0,257$ serta tingkat signifikansi $0,010$ lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$ sehingga bisa dinyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan dengan makna lain H_3 diterima.

Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterbukaan serta kejelasan yang diberikan aparatur desa kepada warga terkait penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan dana desa melalui media papan informasi ataupun poster yang dipasang di balai desa sehingga mempermudah warga bisa mengetahuinya dengan jelas (Fauzani, 2018). Selain itu melalui transparansi dengan sendirinya dapat

tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat sebab masyarakat mengetahui hal apa saja yang dilakukan pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah atau dengan arti lain semakin terbuka (transparan) pemerintah desa dalam mengelola laporan keuangan pemerintahan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sukmawati, 2019).

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan beberapa studi pengamatan terdahulu yaitu Mualifu (2019), Firdaus *et al.*, (2020) serta Ngakil (2020) dimana menyatakan transparansi secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sangki *et al.*, (2016), Fitri dan Alfi (2019) menyatakan tidak terdapat transparansi terkait anggaran yang dikelola pemerintah desa sehingga warga tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan tidak diketahui oleh warga.

4. Untuk menguji hipotesis keempat, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan hasil nilai *tolerance* $0,199 > 0,10$, VIF $5,014 < 10$, nilai koefisien $0,308$ serta tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$ sehingga bisa dinyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan dengan makna lain H_4 diterima.

Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketersediaan informasi serta kemudahan akses yang diberikan aparatur pemdes seperti melalui *website* resmi desa sebagai bentuk fasilitas bagi warga agar dapat mengetahui serta memperoleh laporan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan mudah (Sande, 2013). Selain itu juga semakin mudah dipahami serta dimengerti laporan keuangan desa oleh warga maupun pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan desa maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan cenderung semakin baik pula, begitupun sebaliknya (Lewier, 2016).

Hasil studi pengamatan ini selaras dengan pengamatan Superdi (2017), Fauzani *et al* (2018), serta Musdalifah (2020) dimana menyimpulkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian Azizah *et al* (2015) serta didukung dengan riset Puspa (2020) yang menyatakan aksesibilitas tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana kemudahan individu guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan tidak berdampak kepada akuntabilitas desa serta terbatasnya media yang dipakai dalam menyampaikan informasi terkait laporan pengelolaan anggaran desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan, sehingga saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah khususnya Kecamatan Petarukan sebaiknya meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa guna mengelola alokasi dana desa dengan cara melaksanakan pelatihan bagi aparatur desa selaku tim pelaksana desa terkait manajemen serta administrasi pengelolaan ADD.

2. Bagi khalayak umum (*public*), hasil studi pengamatan ini diharapkan bisa menambah literatur terkait sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperluas penelitian dengan menambah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana belum dibahas pada studi pengamatan ini, selain itu peneliti selanjutnya juga bisa menambah variabel independen seperti komitmen lembaga pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem informasi akuntansi, serta dapat mengambil sampel ataupun desa yang berbeda.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman secara langsung dilokasi penelitian selama proses studi pengamatan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi serta bisa menjadi faktor supaya lebih diperhatikan lagi bagi peneliti yang akan datang guna lebih menyempurnakan penelitiannya, sebab studi pengamatan ini sendiri tentu terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Jumlah populasi terbatas dimana desa se-Kecamatan Petarukan yang berjumlah 19 desa, sehingga penelitian ini memungkinkan

adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan di lingkungan Kecamatan lain di Kabupaten Pemalang.

2. Dalam proses pengambilan data informasi yang diberikan oleh responden dengan melalui kuesioner tidak bisa menunjukkan pendapat serta keadaan tempat responden bekerja yang sesungguhnya. Hal tersebut terjadi sebab terdapatnya perbedaan pemikiran, anggapan serta pemahaman berbeda antara responden satu dengan responden lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi juga seperti kejujuran responden dalam pengisian kuesionernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aramide, Sanusi, S., & Mustapha. (2015). The Effectiveness of Internal Control System and Financial Accountability at Local Government Level in Nigeria. *International Journal of Research in Business Management (IMPACT: IJRBM)*.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Vol 3 (1)*, 67-82.
- Azizah, N. (2014). Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan. *jraam.polinema. ac.id index.php*.
- Baihaqi. (2019). *Selewengkan Dana Desa, Mantan Kades dari Pemalang Dituntut 3 Tahun 10 Bulan*. Dipetik januari 2021, dari Jatengtoday.com: <https://jatengtoday.com>
- Bayu, D. J. (2020). *Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020*. Dipetik Januari 2021, dari databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id>
- Cheng, R. H. (2002). Educating Government Financial Managers: University collaboration Between Business and Public Administration. *The Journal of Government Financial Management, Vol.5 (3)*, 10-15.
- Dilago, R., Lumolos, J., Waworundeng, &, & W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 (1)*, 1-9.
- Fadil, M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal). *Jurnal Accounting fakultas ekonomi dan bisnis, Vol.2 (2)*, Hal 1-12.
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono. (2018). Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku

- Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 8 .
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2017). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (8), 1-15.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen.
- Indriasih, D. (2014). The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting In Local Government. *Accounting Doctoral Program Faculty of Economics and Business Padjajaran University Indonesia*, vol 5, No.20 ISSN 2222-1697.
- James, S. d. (2003). *Time Management*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI).
- Kompri. (2017). *Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori untuk Praktik Profesional*. Jakarta : Kencana.
- Krismiaji, D. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Lamo, A. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Lembaga Administrasi negara dan Badan Pengawasan , & Keuangan dan Pembangunan RI. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5 (Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)*. Jakarta: LAN BPKP RI.
- Lewier, C., & Kurniawan, C. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. *Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moeheriono. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mohamad, I. e. (2004). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi ke dua*. Diambil kembali dari <http://www.lan.go.id>.
- Motik, & Suryani, S. (2003). *Transparansi & Akuntabilitas dan Minat Berinvestasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering, Vol 1*, 49-59.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon. *Jurusan Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan* , 1-20.
- Musthofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporam Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765*.
- Narsa, N. P. (2017). SAK-ETAP Sebagai Solusi Overload Standar Akuntansi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi . *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(1), 44-65.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology Universitas Jenderal Soedirman, vol 3 (2)*, 92-107.
- Prasetyantoko, A. (2008). *Coporate Governance: Pendekatan Institusional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Primayani, P. R., Herawati, N. T., & Darmawan, N. (2014). Pengaruh pengendalian internal, Value for money, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (studi empiris pada SKPD di Pemerintahan daerah Kabupaten Klungkung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* , 2(1).

- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 20 (2), 281-298.
- Ramadhan, A. (2020, Februari 2). *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak muncul Pada 2019*. (K. Erdianto, Penyunting) Dipetik Desember sabtu, 2020, dari Kompas.com: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>
- Robbins, S. P. (2007). *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Gramedia. Edisi Kesepuluh.
- Rohman, A., Ferina, I. S., & Ermadiani. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). *Faculty of Economics and Business Riau University*, 1, 1-14.
- Rudana, N. (2005). Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi: Universitas Diponegoro*.
- Sagala, & Rivai. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Rajawali Pers.
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Santi, Y. W., Utary, A. R., & Kurniawan, I. S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, Vol.3 (2), 281-297.
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indagiri Hulu. *Faculty of Economics Riau University*, 4, 571-586.

- Satrio, A. D. (2019). *ICW: Total Ada 212 Tersangka Dana Desa Sejak 2016 hingga 2018*. Dipetik Desember sabtu, 2020, dari okezone.com: <https://nasional.okezone.com/amp/2019/11/08/337/2127415/icw-total-ada-212-tersangka-dana-desa-sejak-2016-hingga-2018>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Edisi 6.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*.
- Sudarmanto. (2018). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung. *Faculty of Economics Riau University, Vol. 4 (1)*, 2015-2029.
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Vol 17*, 2579-647.
- Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Widjaja. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(2)*, 1-20.

- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran*.
- Yulianti, W., Kamaliah, & Rasuli. (2019). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau*, Vol 27, 386-398.

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu

Pejabat/Pegawai Pemerintah Desa.....

Ditempat

Hal : Permohonan Mengisi Lembar Kuesioner Penelitian

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan penyusunan skripsi untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, maka peneliti :

Nama : Dinda Febriana

Npm : 4317500108

Program Studi : Akuntansi

Alamat : Desa Kendaldoyong Rt.03 Rw.04 Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang

Dengan ini, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu guna memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Seluruh jawaban yang dipilih adalah benar. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap Bapak/Ibu memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja. Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya dipakai guna kepentingan akademik.

Mengingat kesuksesan penelitian ini sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, maka sangat dimohon supaya Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap. Atas kerjasama yang baik serta kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner penelitian ini, peneliti mengucapkan terima kasih.

Hormat saya

Dinda Febriana
NPM:4317500108

IDENTITAS RESPONDEN

Dimohon untuk mengisi data-data berikut ini dengan tanda (√) pada pilihan yang tersedia :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
3. Umur :(Tahun)
4. Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA/SMK
☐ D3 ☐ S1 ☐ S2
5. Jabatan :
6. Lama Kerja diposisi ini :(Tahun)
7. Nama Desa :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Peneliti sangat mengharapkan Bapak/Ibu mengisi semua daftar pernyataan dalam kuesioner ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja.
2. Berilah tanda checklist (✓) pada salah satu jawaban yang mendekati argumen Bapak/Ibu.
3. Pada setiap pernyataan hanya dibutuhkan satu jawaban. Untuk jawaban setiap item pernyataan terdapat 5 (lima) alternative jawaban sebagai berikut:

Pilih Jawaban	Keterangan
SS	Sangat Setuju
S	Setuju
N	Netral
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

Daftar Pernyataan:

A. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X1)

Sistem Pengendalian Internal						
Sistem Pendendalian internal yaitu sebuah rencana dan metode instansi atau organisasi yang dipakai guna menjaga serta melindungi aset, menghasilkan informasi akurat dan bisa dipercaya, meningkatkan efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015:216).						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Dimensi Lingkungan Pengendalian						
1.	Kepala Desa secara rutin melaksanakan evaluasi kinerja sesuai dengan indikator dan tolak ukur kinerja.					
2.	BPD senantiasa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa.					
3.	Pemerintah desa memiliki struktur organisasi yang jelas.					
Dimensi Kegiatan Pengendalian						
1.	Pemerintah desa serta BPD harus mengetahui peraturan penyelenggaraan anggaran dana desa.					

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
2.	Bendahara desa senantiasa melaksanakan riview sistem dengan melalui pencatatan manual secara rutin.					
3.	Perangkat desa menjalin hubungan yang baik dengan instansi atau organisasi lain yang terkait dengan program kerja yang dilaksanakan.					
Dimensi Informasi dan Komunikasi						
1.	Proses siklus akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan dikerjakan secara kompetensi.					
2.	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					
3.	Pemerintah desa memiliki program kerja yang dapat mewujudkan tujuan instansi secara efektif dan efisien.					
Dimensi Penilaian Resiko						
1.	Pemerintah desa melakukan investasi secara berkala (<i>stock opname</i>).					
2.	Perangkat desa melakukan pemisahan fungsi pencatatan.					
3.	Pemerintah desa mempunyai rencana pengelolaan untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran dana desa.					
Dimensi Pemantauan Pengendalian Intern						
1.	Pemerintah desa mempunyai penilaian atau evaluasi kegiatan dalam bekerja bagi perangkat desa.					
2.	Fungsi audit internal di instansi desa sudah baik.					

B. Variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X2)

Kompetensi Pemerintah Desa						
Kompetensi yaitu kemampuan (<i>ability</i>) atau potensi seseorang untuk menyelesaikan seluruh tugas dalam pekerjaannya (Robbins, 2007:38).						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Dimensi Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)						
1.	Saya mengetahui dan memahami Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.					
2.	Saya selalu mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan saya dalam membuat laporan keuangan.					
3.	Saya sebagai aparatur desa mampu mengoperasikan komputer dengan baik.					
Dimensi Keterampilan (<i>skill</i>)						
1.	Saya memahami tugas dan fungsi pokok serta uraian tugas sebagai penyusun laporan keuangan dan telah melaksanakan tugas dengan baik.					
2.	Saya sebagai aparat desa melakukan pembukuan mendasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).					
3.	Saya mampu bekerjasama secara baik dengan pegawai lain dalam menyelesaikan tugas.					
Dimensi Sikap atau Perilaku (<i>attitude</i>)						
1.	Saya dalam bekerja selalu mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang perangkat desa.					
2.	Saya sebagai perangkat desa mempunyai inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang tersedia.					
3.	Saya sebagai aparatur desa senantiasa menerapkan perilaku dan norma yang baik dalam setiap kegiatan.					

C. Variabel Transparansi (X3)

Transparansi						
Transparansi merupakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyampaikan informasi yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada berbagai pihak yang memerlukan informasi (Mardiasmo, 2009:18).						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Dimensi Keterbukaan						
1.	Pemerintah desa menyampaikan informasi anggaran desa kepada publik sesuai dengan kondisi sebenarnya yang terjadi.					
2.	Pemerintah desa telah memberikan transparansi anggaran guna mengakomodasi usulan atau argumen rakyat.					
3.	Pemerintah desa sebagai pengelola dana desa terbuka terkait sistem informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat.					
4.	Masyarakat di desa saya terlibat langsung dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh desa.					
Dimensi Kejelasan						
1.	Informasi mengenai kebijakan anggaran mudah didapatkan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui serta memahami dengan jelas informasi yang disampaikan.					
2.	Penyampaian informasi terkait laporan pertanggungjawaban dana desa dilakukan tepat waktu.					
3.	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan.					

D. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4)

Aksesibilitas Laporan Keuangan						
Aksesibilitas yaitu bentuk kemudahan dari beberapa pihak (pemerintah) yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan guna mendapatkan informasi tentang keuangan daerah (Sari, 2017).						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Dimensi Ketersediaan Informasi						
1.	Laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang dipublikasikan telah mencakup realisasi pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa secara lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.					
2.	Pemerintah desa sebagai penyedia informasi bertanggungjawab secara penuh atas informasi yang dipublikasikan.					
3.	Pemerintah desa sudah sepenuhnya berupaya memberikan kemudahan akses terkait laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat.					
Dimensi Kemudahan Diakses						
1.	Laporan pertanggungjawaban keuangan desa di publikasikan secara terbuka melalui sarana media masa seperti website resmi desa.					
2.	Pemerintah desa memberikan kemudahan masyarakat untuk mengetahui hasil pertanggungjawaban laporan keuangan desa sehingga masyarakat dapat mengakses setiap waktu.					
3.	Di instansi Bapak/Ibu/i bekerja terjalin kerja sama dengan media massa dan lembaga pemerintahan dalam peningkatan informasi.					
4.	Tersedia akses yang mudah untuk memperoleh informasi tentang dana desa.					

E. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa						
Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, kemudian pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan yang dengan benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada badan pengawas daerah dan khususnya masyarakat yang mempunyai hak untuk menuntut dan mengetahui proses pengelolaan keuangan desa (Halim, 2017).						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Dimensi Tahap Perencanaan						
1.	Di desa tempat Bapak/Ibu bekerja, Raperdes APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.					
2.	Pemerintah desa menyampaikan pengumuman penggunaan APBDes kepada masyarakat melalui sarana memasang spanduk atau poster.					
3.	Di desa tempat Bapak/Ibu bekerja, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa terkait APBdesa berdasarkan RKPDesa.					
Dimensi Tahap Pelaporan						
1.	Laporan keuangan desa diperiksa oleh inspektorat daerah dan pemerintah desa.					
2.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati.					
Dimensi Tahap Pertanggungjawaban						
1.	Di desa tempat Bapak/Ibu bekerja melaksanakan pencatatan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan.					
2.	Di desa tempat Bapak/Ibu bekerja dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dilaksanakan secara transparan dan tepat waktu.					
3.	Di desa tempat Bapak/Ibu bekerja, Laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan dalam realisasi penyelenggaraan APBDesa terdiri dari pendapatan, pembiayaan, serta belanja.					

Lanjutan...

35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
36	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	46
37	4	4	5	5	4	4	4	4	4	2	3	4	3	3	53
38	4	4	5	5	4	4	4	4	4	2	3	4	3	3	53
39	4	4	5	5	4	4	4	4	4	2	3	4	3	3	53
40	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	65
41	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	3	57
42	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	64
43	4	4	5	4	5	4	5	3	5	4	4	5	4	4	60
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	67
45	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	66
46	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
47	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	61
48	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	65
49	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	57
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
54	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	67
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
57	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	63
58	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	63
59	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	63
60	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	63
61	4	4	5	5	4	3	5	4	5	3	3	4	5	3	57
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	52
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	54
64	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	64
65	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
67	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
69	5	5	5	5	4	4	5	5	5	3	4	5	4	4	63
70	4	4	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	3	4	60

Lanjutan...

28	5	4	4	4	3	4	5	5	5	39	66	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	5	4	4	4	3	4	5	4	5	38	64	4	4	5	5	4	5	5	5	42
29	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44	67	4	4	4	4	4	4	4	4	36
30	5	4	5	4	5	5	5	5	5	43	68	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	69	3	5	5	3	3	4	5	4	37
32	4	3	4	4	4	5	5	5	5	39	70	4	5	5	5	5	5	5	4	43
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	71	4	4	4	4	4	4	4	4	36
34	3	3	3	3	3	4	5	4	4	32	72	5	5	5	5	5	5	5	5	45
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	73	4	4	4	4	4	4	4	4	36
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	74	5	5	5	5	4	5	5	5	44
37	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35	75	4	4	5	5	4	4	5	4	40
38	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35	76	5	5	5	5	5	5	5	5	45

No. Resp.	Transparansi (X3)							Total	No. Resp.	Transparansi (X3)							Total
	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7	
1	4	4	5	5	4	4	4	30	39	3	3	3	3	4	4	4	24
2	5	5	4	5	5	4	5	33	40	5	5	4	5	4	3	5	31
3	4	4	4	5	4	4	5	30	41	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	5	5	4	4	4	30	42	5	4	4	4	4	4	4	29
5	4	4	4	4	4	4	4	28	43	4	5	4	3	4	5	4	29
6	5	5	5	5	5	5	5	35	44	5	5	5	5	5	4	4	33
7	5	5	5	5	5	5	5	35	45	4	5	5	5	4	4	4	31
8	4	4	3	4	4	2	4	25	46	4	4	4	4	4	4	4	28
9	5	5	5	5	5	4	4	33	47	4	4	5	4	4	4	4	29
10	4	4	4	4	4	4	4	28	48	5	5	5	5	5	5	5	35
11	4	4	4	4	4	4	4	28	49	4	4	4	4	4	4	4	28
12	4	4	4	5	4	4	4	29	50	4	4	4	4	4	4	4	28
13	3	4	3	4	4	4	4	26	51	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	4	4	5	4	4	4	29	52	4	4	4	4	4	4	4	28
15	5	5	5	5	5	4	5	34	53	5	5	5	5	5	5	5	35
16	5	4	5	4	4	4	5	31	54	5	5	5	5	5	5	5	35
17	5	5	5	5	5	5	5	35	55	5	5	5	5	5	5	5	35
18	5	5	5	5	5	5	5	35	56	5	5	5	5	5	5	5	35
19	5	5	5	5	5	5	5	35	57	4	4	4	5	4	3	4	28
20	5	5	5	5	5	5	5	35	58	4	4	4	5	4	3	4	28

21	4	4	4	5	4	4	4	29	59	4	4	4	5	4	3	4	28
22	4	4	4	4	4	4	4	28	60	4	4	4	5	4	3	4	28
23	4	4	3	4	4	4	4	27	61	4	4	4	3	4	3	5	27
24	5	4	3	5	4	4	4	29	62	4	4	4	2	2	4	4	24
25	4	4	5	5	4	3	4	29	63	4	4	4	2	2	2	2	20
26	4	4	5	5	5	4	5	32	64	4	4	4	5	4	4	4	29
27	4	4	5	5	5	4	5	32	65	5	5	5	5	5	5	5	35
28	4	4	5	5	5	4	5	32	66	4	4	4	4	4	4	4	28
29	5	5	5	5	5	4	5	34	67	4	4	4	4	4	4	4	28
30	5	5	5	5	4	4	4	32	68	4	4	4	4	4	4	4	28
31	4	4	4	5	4	4	4	29	69	5	4	5	5	4	4	4	31
32	2	3	2	4	2	1	4	18	70	5	5	5	5	5	5	4	34
33	4	4	4	4	4	4	4	28	71	3	4	3	4	4	4	4	26
34	4	4	4	4	4	4	4	28	72	5	5	5	5	5	5	5	35
35	4	4	4	4	4	4	4	28	73	4	4	4	4	4	4	4	28
36	3	3	3	3	3	3	3	21	74	5	5	4	5	5	4	5	33
37	3	3	3	3	4	4	4	24	75	5	5	5	5	5	4	5	34
38	3	3	3	3	4	4	4	24	76	5	5	5	5	5	5	5	35

No. Resp.	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4)							Total	No. Resp.	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4)							Total
	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7	
1	4	4	3	4	4	2	4	25	39	4	4	3	3	3	3	3	23
2	5	5	5	4	4	3	4	30	40	4	5	4	5	5	5	5	33
3	4	5	4	3	3	4	4	27	41	4	4	4	3	3	3	4	25
4	4	4	3	4	4	2	4	25	42	5	4	4	4	4	4	4	29
5	4	4	4	4	4	3	4	27	43	5	4	4	5	4	4	4	30
6	5	5	5	3	5	5	5	33	44	4	4	4	4	4	4	4	28
7	5	5	5	4	5	5	5	34	45	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	4	3	3	3	4	4	25	46	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	4	4	4	4	4	4	28	47	4	4	4	4	4	4	4	28
10	4	4	4	4	4	4	4	28	48	5	5	5	4	5	5	5	34
11	5	4	4	5	4	4	4	30	49	4	4	4	4	4	4	4	28
12	5	4	4	5	3	3	3	27	50	4	4	4	4	4	4	4	28
13	4	4	4	3	3	3	3	24	51	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	4	4	3	3	3	4	25	52	4	4	4	4	4	4	4	28

Lanjutan...

8	4	4	4	3	3	4	2	4	28	46	5	5	4	4	4	4	4	34
9	5	4	5	4	5	4	4	4	35	47	4	4	4	4	4	4	4	32
10	5	4	5	4	5	4	4	4	35	48	5	5	5	5	5	5	5	40
11	5	5	5	5	5	4	4	4	37	49	4	4	4	4	4	4	4	32
12	5	5	5	5	5	4	4	4	37	50	4	4	4	4	4	4	4	32
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32	51	4	4	4	4	4	4	4	32
14	4	4	4	4	4	4	3	4	31	52	4	4	4	4	4	4	4	32
15	5	5	5	5	5	5	4	5	39	53	5	5	5	5	5	5	5	40
16	5	4	4	4	5	4	5	5	36	54	5	5	5	5	5	5	5	40
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40	55	5	5	5	5	5	5	5	40
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40	56	5	5	5	5	5	5	5	40
19	5	5	5	5	5	5	5	5	40	57	4	5	4	4	4	5	5	36
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40	58	4	5	4	4	4	5	5	36
21	5	5	5	5	4	4	4	5	37	59	4	5	4	4	4	5	5	36
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32	60	4	5	4	4	4	5	5	36
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32	61	5	3	4	4	5	4	4	34
24	5	5	5	5	5	4	4	4	37	62	4	4	4	4	4	4	2	30
25	5	4	5	4	5	4	3	5	35	63	4	4	4	4	4	4	2	30
26	5	4	5	5	5	4	4	5	37	64	5	5	5	4	4	4	4	36
27	5	4	5	5	5	4	4	5	37	65	5	5	5	4	5	4	4	37
28	5	4	5	5	5	5	5	5	39	66	4	4	4	4	4	4	4	32
29	5	5	5	5	5	5	5	5	40	67	4	4	4	4	4	4	4	32
30	5	5	5	4	5	5	4	4	37	68	4	4	4	4	4	4	4	32
31	4	4	4	4	4	4	4	4	32	69	5	5	5	5	5	4	4	37
32	4	4	4	4	4	4	2	4	30	70	5	5	5	5	4	5	5	39
33	4	4	5	4	4	4	4	4	33	71	4	4	4	4	4	4	4	32
34	4	4	5	4	4	4	4	4	33	72	5	5	5	5	5	5	5	40
35	4	4	4	3	3	4	4	4	30	73	4	4	4	4	4	4	4	32
36	3	3	3	3	3	3	3	3	24	74	4	5	4	4	4	5	5	36
37	3	4	4	4	4	4	4	4	31	75	5	5	5	5	4	4	4	37
38	3	4	4	4	4	4	4	4	31	76	5	5	5	5	5	5	5	40

Lampiran 3: Hasil Uji Validitas

a. Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal

[illegible]

N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.5 Pearson Correlation	,363**	,620**	,482**	,664**	1	,577**	,296**	,411**	,238*	,699**
Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000		,000	,009	,000	,039	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.6 Pearson Correlation	,466**	,562**	,586**	,534**	,577**	1	,486**	,566**	,596**	,795**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.7 Pearson Correlation	,454**	,283*	,268*	,427**	,296**	,486**	1	,624**	,607**	,653**
Sig. (2-tailed)	,000	,013	,019	,000	,009	,000		,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.8 Pearson Correlation	,573**	,522**	,517**	,563**	,411**	,566**	,624**	1	,718**	,801**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.9 Pearson Correlation	,564**	,438**	,539**	,477**	,238*	,596**	,607**	,718**	1	,750**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,039	,000	,000	,000		,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
JML_X2 Pearson Correlation	,727**	,760**	,765**	,829**	,699**	,795**	,653**	,801**	,750**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Uji Validitas Variabel Transparansi

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	JML_X3
X3.1 Pearson Correlation	1	,852**	,751**	,570**	,670**	,566**	,568**	,864**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X3.2 Pearson Correlation	,852**	1	,719**	,576**	,687**	,583**	,595**	,866**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X3.3 Pearson Correlation	,751**	,719**	1	,573**	,644**	,571**	,523**	,837**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X3.4 Pearson Correlation	,570**	,576**	,573**	1	,690**	,324**	,562**	,755**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,004	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X3.5 Pearson Correlation	,670**	,687**	,644**	,690**	1	,693**	,757**	,895**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X3.6 Pearson Correlation	,566**	,583**	,571**	,324**	,693**	1	,532**	,748**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,004	,000		,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X3.7 Pearson Correlation	,568**	,595**	,523**	,562**	,757**	,532**	1	,778**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
JML_X3 Pearson Correlation	,864**	,866**	,837**	,755**	,895**	,748**	,778**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	76	76	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

Correlations								
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	JML_X4
X4.1 Pearson Correlation	1	,566**	,662**	,600**	,643**	,449**	,449**	,766**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X4.2 Pearson Correlation	,566**	1	,768**	,327**	,642**	,534**	,687**	,783**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,004	,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X4.3 Pearson Correlation	,662**	,768**	1	,425**	,691**	,547**	,678**	,841**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X4.4 Pearson Correlation	,600**	,327**	,425**	1	,603**	,417**	,384**	,688**
Sig. (2-tailed)	,000	,004	,000		,000	,000	,001	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X4.5 Pearson Correlation	,643**	,642**	,691**	,603**	1	,691**	,732**	,903**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X4.6 Pearson Correlation	,449**	,534**	,547**	,417**	,691**	1	,672**	,790**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
X4.7 Pearson Correlation	,449**	,687**	,678**	,384**	,732**	,672**	1	,818**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,000	,000		,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76
JML_X4 Pearson Correlation	,766**	,783**	,841**	,688**	,903**	,790**	,818**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	76	76	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

e. Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Correlations									
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	JML_Y
Y1 Pearson Correlation	1	,475**	,755**	,416**	,725**	,399**	,317**	,564**	,755**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,005	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Y2 Pearson Correlation	,475**	1	,501**	,630**	,401**	,550**	,440**	,520**	,744**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Y3 Pearson Correlation	,755**	,501**	1	,632**	,746**	,423**	,347**	,594**	,814**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,002	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Y4 Pearson Correlation	,416**	,630**	,632**	1	,586**	,380**	,352**	,534**	,756**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,001	,002	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Y5 Pearson Correlation	,725**	,401**	,746**	,586**	1	,411**	,359**	,546**	,782**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,001	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Y6 Pearson Correlation	,399**	,550**	,423**	,380**	,411**	1	,679**	,636**	,732**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,000		,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Y7 Pearson Correlation	,317**	,440**	,347**	,352**	,359**	,679**	1	,556**	,685**
Sig. (2-tailed)	,005	,000	,002	,002	,001	,000		,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Y8 Pearson Correlation	,564**	,520**	,594**	,534**	,546**	,636**	,556**	1	,807**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
JM Pearson Correlation	,755**	,744**	,814**	,756**	,782**	,732**	,685**	,807**	1
L_ Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Y N	76	76	76	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4: Hasil Uji Reliabilitas

a. Variabel Sistem Pengendalian Internal

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,907	14

b. Variabel Kompetensi Pemerintah Desa

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,902	9

c. Variabel Transparansi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,915	7

d. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,898	7

e. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,888	8

Lampiran 5: Bukti Pengambilan Data

TANDA IZIN PENGAMBILAN DATA PENELITIAN		
NO	KETERANGAN	TANDA PENGAMBILAN
1.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Kendaloyong	
2.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Kendalrejo	
3.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Klareyan	TGL : MENGETAHUI a.n. KEPALA DESA KLAREYAN SEKRETARIS DESA KLAREYAN AGUS ARYANTO, S.H.
4.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Pegundun	
5.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Bulu	
6.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Loning	
7.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Nyamplungsari	
8.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Tegalmati	
9.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Serang	

10.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Karangasem	
11.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Petanjungan	
12.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Kendalsari	
13.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Widodaren	
14.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Sirangkang	
15.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Iser	
16.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Pesucen	
17.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Kalirandu	
18.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Temuireng	
19.	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Panjunan	

Lampiran 6: Dokumentasi Pengisian Kuesioner

